

BUKU SAKU

- ❑ RPJMD-P 2018-2023
- ❑ RKPD PROVINSI 2023
- ❑ PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NTT

RPJMD PERUBAHAN

2018-2023



VISI RPJMD 2018-2023

VISI:
“NTT BANGKIT
MEWUJUDKAN
MASYARAKAT
SEJAHTERA DALAM
BINGKAI NEGARA
KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA”.



MISI :

1. Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pariwisata nasional (Ring of beauty)
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
5. Mewujudkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik

BANGKIT

1. Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, kemampuan berusaha serta menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat NTT.
2. Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.



SEJAHTERA

1. Terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat baik sandang, pangan dan papan.
2. Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah dengan pendekatan pembangunan berbasis keadilan sosial





NTT BANGKIT & NTT SEJAHTERA

NTT BANGKIT 2018-2023

PENINGKATAN KAPASITAS:

1. Neraca Perdagangan impor-ekspor dari defisit 54 juta \$ US menjadi surplus 10 – 15 juta US\$
2. Kunjungan wisatawan dari 650 ribu orang menjadi 1,6 juta orang
3. Meningkatkan produksi padi 900.000 ton menjadi 1,85 juta ton
4. Pertanian lahan kering kepulauan:
 - Meningkatkan produksi jagung dari 650 ribu ton menjadi 1,26 juta ton
 - Populasi sapi dari 1 juta menjadi 1,39 juta ekor
5. Produksi perikanan budidaya 2,57 juta ton (termasuk rumput laut)
6. Jumlah unggas 22,58 juta ekor
7. Jalan Provinsi pada tahun 2021, 100 % mantap (2.650 km)

NTT BANGKIT 2018-2023

SEBELUM PERUBAHAN

• **PENINGKATAN KAPASITAS:**

1. Neraca Perdagangan impor-ekspor dari defisit 54 juta \$ US menjadi surplus 10 – 15 juta US\$
2. Kunjungan wisatawan dari 650 ribu orang menjadi 1,5 juta
3. Meningkatkan produksi padi 900. 000 ton menjadi 1,3 juta ton pada DI teknis termasuk DI pada bendungan baru
4. Pertanian lahan kering kepulauan:
 - Meningkatkan produksi jagung dari 650 ribu ton menjadi 1 juta ton (Tambahkan Luas tanam pada Lahan Tidur dan kawasan Perhutanan Sosial)
 - Populasi sapi dari 1 juta menjadi 2 juta ekor
5. Pengembangan Budidaya Perikanan dan Rumput Laut
6. Mendorong swasembada ayam dan telur
7. Jalan Provinsi pada tahun 2021, 100 % mantap

SETELAH PERUBAHAN

• **PENINGKATAN KAPASITAS:**

1. Neraca Perdagangan impor-ekspor dari defisit 54 juta \$ US menjadi surplus 10 – 15 juta US\$
2. Kunjungan wisatawan dari 650 ribu orang menjadi 1,6 juta orang
3. Meningkatkan produksi padi 900. 000 ton menjadi 1,85 juta ton
4. Pertanian lahan kering kepulauan:
 - Meningkatkan produksi jagung dari 650 ribu ton menjadi 1,26 juta ton
 - Populasi sapi dari 1 juta menjadi 1,39 juta ekor
5. Produksi perikanan budidaya 2,57 juta ton (termasuk rumput laut)
6. Jumlah unggas 22,58 juta ekor
7. Jalan Provinsi pada tahun 2021, 100 % mantap (2.650 km)

NTT BANGKIT 2018-2023

SEBELUM PERUBAHAN

NEW INSIATIVE

1. Meningkatkan kapasitas Ekspor dan Pasar nasional
 - Kerjasama perdagangan Selatan-Selatan
 - Pengembangan garam 2 juta mt
 - Pengembangan 50 juta pohon kelor
 - Budidaya perikanan mulut seribu
 - Industrialisasi produk pertanian dan perikanan
 - Pengembangan *Marina Bay* di Alor
 - Produksi Beras
2. Pariwisata estate *in the ring of beauty*
3. *Breeding Farm* dan industri pakan ternak
4. Peningkatan Wirausaha Baru (start up)
5. Pembangunan Infrastruktur pada pusat pertumbuhan
6. Pengembangan dan Penyertaan Modal BUMdes

SETELAH PERUBAHAN

NEW INSIATIVE

1. Meningkatkan kapasitas Ekspor dan Pasar nasional
 - Kerjasama perdagangan Selatan-Selatan
 - Pengembangan garam 2 juta mt
 - Pengembangan 26 juta pohon kelor (Produksi Kelor Basah 1300 ton, Kering 130 ton, Tepung 13 ton)
 - Budidaya perikanan : Kerapu & Kakap Putih (Mulut seribu, Wae Kelambu, Hasan Maubesi, Hada Kewa)
 - Industrialisasi produk pertanian dan perikanan
2. Pariwisata estate *in the ring of beauty*
3. Pembangunan pabrik pakan ternak di 3 lokasi
4. Peningkatan Wirausaha Baru (start up)
5. Pengembangan Pelabuhan Tenau Kupang
6. Ivestasi pada sektor produktif dengan dana PEN
7. Pembangunan Infrastruktur pada pusat pertumbuhan
8. Pengembangan dan Penyertaan Modal BUMdes

NTT SEJAHTERA 2018-2023

SEBELUM PERUBAHAN

- **PENINGKATAN KAPASITAS:**
- Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni (640 ribu unit)
- Peningkatan Kapasitas Ekonomi KK Miskin
- Layanan Puskesmas Terapung dan *Flying Health Care*
- Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Daya Saing Internasional (10 ribu tenaga kerja)
- Peningkatan IPM melalui Rata-rata Lama Sekolah, harapan lama sekolah, usia harapan hidup dan peningkatan pendapatan masyarakat

SETELAH PERUBAHAN

- **PENINGKATAN KAPASITAS:**
- Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni (17.498 unit), peningkatan RTLH 400 ribu unit
- Peningkatan Kapasitas Ekonomi :
KUBE 6.500 KK miskin per tahun
JPS untuk 63.000 KK Miskin (453,6 M Lebih)
- Layanan kesehatan bergerak di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan – DTPK (laut, darat dan udara) 7 unit
- Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Siap Pakai di SMK
- Peningkatan IPM melalui Rata-rata Lama Sekolah, harapan lama sekolah, usia harapan hidup dan peningkatan pendapatan masyarakat

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DALAM PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023

INDIKATOR	Baseline	TARGET 2023		
	2019	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	5,87 – 6,50	6,33 – 6,90	6,7 – 7,3
PDRB per Kapita (Rp juta)	19,5	20-23	23-25	25 - 27
Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	65,23	65.54 – 67,00	67.35 – 69,00	70 - 71
Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21-19,63	19,35-16,15	15-12
Inflasi (%)	0,67	3-3,4	3-3,2	3 – 3,2
Prevelensi Stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10 – 12
Indeks Gini (Poin)	0,355	0,35 - 0,34	0,34-0,33	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	94	95	95
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	3,2 -2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5
Rasio PAD (%)	23,90	25,31	30,12	39,74
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO ₂ ^{eq})	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)	44,93	63,91	71,47	80,94
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (poin)	60,37	65	69	71

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DALAM PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023

INDIKATOR	TARGET 2023	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	10,09	6,7 – 7,3
PDRB per Kapita (Rp juta)	25	25 – 27
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	70 - 71	70 – 71
Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	8 - 12	9 – 12
Inflasi (%)	3 – 3,2	3 – 3,2
Indeks Gini (poin)	0,34 – 0,32	0,34 - 0,31
Indeks Pembangunan Gender (poin)	95	95
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,9 – 2,5 (IKK)	1,5 – 2
Rasio PAD (%)		39,74
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO ₂ eq)		17.248.829
Kebutuhan Investasi (Rp triliun)		80,94

Asumsi-asumsi Yang Digunakan :

1. Pandemic Covid-19 dapat diatasi;
2. Peningkatan produksi sektor : pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan.
3. Peningkatan distribusi barang dan pembangunan sejumlah infrastruktur pelabuhan dilak-sanakan.
4. Pengembangan Sumba sebagai pusat listrik tenaga surya yang mensuplay energi ke Jawa dan Bali.

4. Peningkatan konsumsi : baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat.
5. Kebijakan Pemerintah NTT untuk melakukan pinjaman daerah dalam rangka PEN melalui PED (investasi);
6. Peningkatan investasi oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Super Premium di Labuan Bajo, KTT G-20 dan *Asean Summit* tahun 2023;
7. Peningkatan geliat ekonomi yang diperankan oleh UMKM;
8. Peningkatan perekonomian melalui Pembentukan Masyarakat Ekonomi NTT.
9. *Ceteris Paribus* dalam Perekonomian NTT

MISI	TUJUAN	SASARAN
<p style="text-align: center;">MISI I MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN</p>	<p>1.1 Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan 2. Berkurangnya kemiskinan 3. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktivitas angkatan kerja daerah
	<p>1.2 Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah 2. Menguatnya peranan NTT dalam perdagangan regional 3. Menurunnya ketergantungan ekonomi masyarakat 4. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
	<p>1.3 Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah 2. Hadirnya keadilan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

MISI	TUJUAN	SASARAN
<p>MISI II</p> <p>MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (RING OF BEAUTY NTT)</p>	<p>Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama Ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)</p>	<p>Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan pola pendekatan kawasan</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN
<p style="text-align: center;">MISI III MENINGKATKAN KETETRSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN</p>	<p>3.1 Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah 2. Meningkatnya kualitas Infrastruktur Irigasi dan pengairan dalam mendukung perekonomian daerah
	<p>3.2 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak 2. Terlaksananya percepatan pembangunan elektrifikasi
	<p>3.3 Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (<i>sustainability</i>) lingkungan hidup dalam pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menurunnya Emisi Gas rumah Kaca
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkat ketangguhan bencana daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN
<p>MISI IV MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA</p>	<p>Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia NTT yang tinggi dan berdaya saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT 3. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan

MISI	TUJUAN	SASARAN
<p>MISI V</p> <p>MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</p>	<p>Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik</p>	<p>Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
					2021	2022	2023	
MISI I MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL	1.1 Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	1.1.1 Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	5,20	5,87	6,33-6,90	6,7 - 7,3	6,7 - 7,3
			Inflasi (%)	0,67	3-3,4	3-3,2	3-3,2	3- 3,2
			PDRB per Kapita (Rp. Juta)	19,5	20-23	23-25	25- 27	25- 27
		1.1.2 Berkurangnya Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20,62	21-19,63	19,35-16,15	15-12	15-12
			Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)	1,12	1,05	0,98	0,85	0,85
			Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)	4,13	4,02	3,91	3,40	3,40
		1.1.3 Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,35	3,2 -2,6	2,5 - 1,9	1,9 - 1,5	1,9 - 1,5
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,50	69,58	69,67	69,76	69,76
			Produktivitas Total Daerah (Rp. Juta)	43,141	46,583	48,509	50,360	50,360
			Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja (%)	26,02	24,36	22,69	21,02	21,02
	1.2 Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1.2.1 Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	% PAD terhadap Pendapatan daerah (%)	23,90	25,31	30,12	39,74	39,74
		1.2.2 Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	55,83	61,29	62,23	63,10	63,10
		1.2.3 Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Rasio Ketergantungan (%)	64,10	63,50	62,79	62,08	61,36
		1.2.4 Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)	65	67	69	71	73
	1.3 Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial	1.3.1 Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	Indeks Gini (Poin)	0,355	0,35 - 0,34	0,34-0,33	0,34-0,32	0,34-0,32

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
					2021	2022	2023	
MISI II MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (RING OF BEAUTY NTT)		1.3.2 Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	94	95	95	95
			Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	73,37	70,76	72,76	74,76	74,76
			Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani (%)	60	75	80	100	100
			Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani (%)	60	75	80	100	100
	2.1 Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	2.1.1 Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan Pola Pendekatan Kawasan	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	0,75	0,76	0,77	0,78	0,78
			Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB (%)	2,20	2,23	2,32	2,45	2,45
			Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%)	12,08	12,12	12,18	12,23	12,23
		2.1.2 Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)	2	4	6	8	8
			Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	4	4	4
			Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.165.378	1.378.453	1.634.144	1.634.144

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	
					2021	2022	2023		
MISI III MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN	3.1 Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	3.1.1 Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	85	90	100	100	100	
			Dwelling Time Pelabuhan (hari)	5	4	4	3	3	
			Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	0,390	9,08	45,60	74,81	74,81	
	3.2 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	3.2.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	3.1.2 Tersedianya infrastruktur Pengariran yang mendukung peningkatan produksi pertanian	Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	70	75.02	76.74	78.46	78.46
				Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	13.974,00	15.498	9.238	9.238	47.948
				Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak (%)	73	83	85	100	100
	3.3 Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	3.2.2 Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	3.3.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak (%)	60	77	80	100	100
				Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	75	80	85	85
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,5	67	69	75	75

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
					2021	2022	2023	
		3.3.2 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO ₂ e)	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
		3.3.3 Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)	41,7	72,73	85,70	100	100
		3.3.4 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara	Kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%)	75	80	85	90	90
		3.3.1 Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)	147	140	138	135	135
MISI IV MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	4.1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	4.1.1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Angka Melek Huruf (%)	95,76	96,56	98,47	100	100
			Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,55	8,25	8,65	9,5	9,5
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	14,2	14,6	15	15
		4.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Usia Harapan Hidup (tahun)	66,85	68,1	68,8	69	69
			Prevelensi Stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10-12	10-12
		4.1.3 Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	40	60	70	80	80

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
					2021	2022	2023	
MISI V MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.1 Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	5.1.1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	60,37	65	69	71	71
			Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	B	A	A	A	A
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7
			Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	44,41	50	60	75	75
			Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	75	85	90	90	90
			Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,32	82,40	82,50	83	83



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI & PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD 2018-2023

ARAH KEBIJAKAN PROVINSI NTT

Arahan RPJPD Visi pembangunan 2005-2025 NTT YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

RPJMD 2018-2023 NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

TRANSFORMASI STRUKTUR DAN KULTUR DALAM PEMBANGUNAN

2019

Arahan RPJMD 2018-2023 Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pariwisata nasional (Ring of beauty), Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan dan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta Mewujudkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik

2020

PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA SUMBER DAYA MANUSIA

2021

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI MENUJU PADA INDUSTRI DAN JASA BERBASIS PERTANIAN

2022

PENGEMBANGAN MATA RANTAI NILAI PARIWISATA

2023

KEMANDIRIAN LOKAL

ARAH KEBIJAKAN PROVINSI NTT

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<p>TRANSFORMASI STRUKTUR DAN KULTUR DALAM PEMBANGUNAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pelayanan Dasar • Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintahan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat • Sinergitas tujuan dan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya • Reformasi birokrasi system pemerintahan • Pengembangan sitem pemerintahan berbasis elektronik • Keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah 	<p>PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA SUMBER DAYA MANUSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Ekonomi Pariwisata Sebagai Penggerak Utama Pembangunan • Pencapaian dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan keluarga • Pengembangan potensi garam sebagai industri nasional • Pengembangan badan usaha daerah pada sector-sektor potensial dalam peningkatan pendapatan daerah, pembukaan lapangan usaha baru dan peningkatan produk lokal 	<p>PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI MENUJU PADA INDUSTRI DAN JASA BERBASIS PERTANIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lintas Pemangku Kepentingan • Peningkatan sumber daya air untuk kebutuhan pertanian dan air bersih • Peningkatan industri pertanian, perikanan dan peternakan • Intekkoneksi jaringan distribusi produk daerah dan jaringan pariwisata <i>Ring of Beauty</i> 	<p>PENGEMBAGAN MATA RANTAI NILAI PARIWISATA</p> <p>Kebangkitan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama lintas daerah dalam pengembangan produk lokal • Pengembangan industri pariwisata dengan provinsi lain dan luar negeri 	<p>KEMANDIRIAN LOKAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Ekonomi Berkelanjutan • Peningkatan kualitas hidup masyarakat • Pembangunan industri pariwisata sebagai penggerak multi sektor

Misi I	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan
---------------	---

Tujuan 1.1	Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera
-------------------	---

Sasaran 1.1.1	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan
----------------------	--



Strategi

1. Peningkatan Kapasitas Produksi

- a. Meningkatkan produksi pertanian melalui : Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), Kelor/Marungga dan Hortikultura
- b. Meningkatkan produksi Peternakan melalui pengembangan Sapi, Babi, Kambing dan Unggas
- c. Meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (Ikan Kerapu dan Kakap Putih di Mulut Seribu, Wae Klambu, Hasan Maubesi dan Hada Kewa)
- d. Investasi di sektor Produktif dengan sumber pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berorientasi peningkatan PAD yang berbasis masyarakat
- e. Pengendalian Alih Fungsi lahan pertanian
- f. Pengembangan Produk Hutan Bukan Kayu dan Perhutanan Sosial

2.Peningkatan Kapasitas Industri Pengolahan

- a. Pembangunan Infrastruktur Pabrik Pakan Ternak sebagai penunjang ekonomi di Sektor Hulu dan Hilir
- b. Pengembangan Industri pengolahan hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan/Kelautan
- c. Pengembangan Industri Kreatif

3. Peningkatan Pemasaran dan Ekspor Komoditas olahan

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas UMKM/IKRT
- b. Peningkatan Volume Ekspor produk UMKM/IKRT
- c. Peningkatan volume ekspor komoditi Pertanian, Peternakan dan Perikanan/Kelautan

4. Pemberian dukungan dan fasilitasi

- a. Peningkatan fasilitasi perijinan dan mengatasi hambatan Investasi
- b. Mendorong Peternakan Integrasi Hulu dan Hilir
- c. Penataan Industri Pengolahan untuk menghasilkan produk olahan dengan nilai tambah yang tinggi
- d. Memperkuat kerjasama berbasis kontrak dengan Organisasi berbasis Industri
- e. Penciptaan Pengembangan Perdagangan antar Kawasan dan Perbatasan Antar Negara ("Kerjasama Selatan - Selatan")
- f. Memastikan Supply chain sebagai bagian dari pengembangan produksi di Sektor Hulu dan Hilir untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi NTT
- g. Pengendalian pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok

Misi I	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan
---------------	---

Tujuan 1.1	Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera
------------	---

Sasaran 1.1.2	Berkurangnya kemiskinan
---------------	-------------------------



Strategi

- 1. Peningkatan Belanja Perkapita Rumah Tangga**
 - a. Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui kelembagaan ekonomi di tingkat masyarakat (Bumdes, Koperasi Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani dan Kelembagaan ekonomi di Desa lainnya**
 - b. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang adaptif dengan memperhatikan aspek lingkungan, budaya, sosial, politik dan ekonomi masyarakat**
 - c. Penyediaan bantuan bagi kelompok masyarakat rentan / kelompok disabilitas Pemanfaatan dana Bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan Rumah Tangga**

2. Perbaiki Indeks Kedalaman dan Keparahan kemiskinan

- a. Meningkatkan skema Perlindungan sosial yang meliputi penyediaan data, bantuan sosial maupun jaminan social**
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (rumah, sanitasi, air bersih listrik, dan akses terhadap pangan bergizi) Pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu berbasis Desa (*One stop Service*)**
- c. Memastikan tersedianya layanan dasar data kependudukan dan catatan sipil bagi penduduk miskin**
- d. Pemenuhan kebutuhan klien pada panti milik pemerintah dan bantuan untuk panti swasta**

3. Pendukung

- a. Mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB Des dan sumber-sumber pembiayaan lain**
- b. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Misi I	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan
Tujuan 1.1	Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera
Sasaran 1.1.3	Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktivitas angkatan kerja daerah



Strategi

1. Perluasan Akses terhadap lapangan kerja

- a. Pemantapan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja
- b. Penyederhanaan regulasi terkait akses terhadap lapangan kerja

2. Peningkatan produktivitas angkatan kerja

- a. Pengembangan potensi SDM melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan
- b. Perluasan kesempatan angkatan kerja untuk mengakses Program - program peningkatan keahlian
- c. Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk peningkatan keahlian, keterampilan angkatan kerja baru

3. Perlindungan terhadap pekerja

Perlindungan tenaga kerja terkait Keselamatan kerja maupun kesempatan untuk berorganisasi, perlindungan, pengupahan dan jaminan sosial sesuai ketentuan aturan yang berlaku

Misi I	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan
Tujuan 1.2	Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri
Sasaran 1.2.1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah



Strategi

1. Sistem dan Regulasi

- a. Mengintensifkan fasilitasi, sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya Pajak
- b. Perbaikan pada Kualitas SDM bagi petugas Pajak dan Distribusi
- c. Meningkatkan Pengawasan secara internal tentang kinerja Petugas Pajak
- d. Pengembangan Evaluasi Monitoring secara elektronik untuk pembayaran dari sumber pendapatan Retribusi

2. Pemungutan

Inovasi - inovasi untuk peningkatan pajak melalui pembayaran secara online seperti melalui ATM, SMS Banking, Dompot elektronik (Traveloka, Tokopedia, DanaKini, LinkAja dll)

3. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset

- a. Meningkatkan Investasi untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah
- b. Meningkatkan dukungan sektor pendapatan dari Retribusi yang berorientasi bisnis
- c. Melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Daerah yang sehat untuk pengembangan usaha dan menghasilkan keuntungan bagi PAD melalui Analisis Investasi secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah
- d. Pengembangan Sumber Daya Infrastruktur dan pengembangan potensi - potensi baru sebagai penghasilan pendapatan Sektor Non-Migas, Pariwisata, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
- e. Optimalisasi sumber - sumber potensi pendapatan secara komprehensif

Misi I	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan
---------------	---

Tujuan 1.2	Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri
-------------------	--

Sasaran 1.2.2	Menguatnya peranan NTT dalam perdagangan regional
----------------------	--



Strategi

1. Perbaikan infrastruktur

- Pemerataan pembangunan infrastruktur yang bermuara pada konektivitas antar pulau di NTT untuk memastikan 'rantai pasok' perdagangan yang berkelanjutan
- Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri dan pengembangan industri pengolahan komoditi yang bernilai tambah dalam mendukung perdagangan antar pulau di NTT

2. Peningkatan nilai tambah (*value added*) produk

Pengembangan komoditas ekspor unggulan seperti Kopi, Kakao, Vanili, Mente, dan Garam

3. Memperbaiki sistem usaha dan investasi

- Peningkatan kapasitas Industri Kecil Menengah/ Industri Kecil Rumah Tangga (IKM/IKRT) sebagai pendorong ekonomi produktif berbasis masyarakat
- Peningkatan jumlah sertifikasi internasional Komoditi unggulan seperti Kopi, Kakao, Mente, Rumput Laut, dan Kelor/Marungga

Misi I	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan
Tujuan 1.2	Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri
Sasaran 1.2.3	Menurunnya ketergantungan ekonomi masyarakat



Strategi

1. Perluasan akses Rumah Tangga terhadap Kesempatan kerja, berusaha dan pembiayaan

- a. Sosialisasi pemanfaatan skim pembiayaan untuk rumah tangga miskin
- b. Perbaiki sistem pendataan kelompok usia lanjut dan anak - anak usia non produktif
- c. Peningkatan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan permodalan melalui peningkatan sarana prasarana produksi dan pemasaran yang berbasis masyarakat

Misi I	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan
Tujuan 1.2	Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri
Sasaran 1.2.4	Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan



Strategi

1. Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan

Mengoptimalkan produksi dan produktivitas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan

2. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan

Peningkatan pengawasan terhadap bahan pangan untuk menjamin keamanan pangan

3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat

- a. Menjamin penyediaan asupan pangan bergizi seimbang dan aman bagi kelompok 1000 HPK (Ibu hamil dan Ibu menyusui dengan Anak Baduta) tidak mampu/miskin
- b. Kebijakan kemandirian pangan dengan peningkatan konsumsi Ikan melalui peningkatan produksi Ikan baik di laut maupun di darat

4. Pendukung

- a. Peningkatan kegiatan infrastruktur SDA untuk menambah kuantitas air seperti menambah Waduk melalui kegiatan pengelolaan SDA terpadu
- b. Optimalisasi Sumber Daya Lahan seperti pemanfaatan Lahan Sub Optimal (LSO), penambahan lahan potensial yang sesuai dengan peruntukkan (Kawasan Pertanian lahan basah dan lahan kering, komoditas penghasil bioenergi non-pangan dan perkebunan, dan pemanfaatan lahan terlantar)

Misi I	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan
---------------	---

Tujuan 1.3	Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial
-------------------	---

Sasaran 1.3.1	Berkurangnya ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah
----------------------	---



Strategi

- 1. Pembangunan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi baru**
 - a. Menumbuhkan pusat - pusat ekonomi baru untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antara wilayah
 - b. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk meningkatkan daya saing dan potensi ekonomi daerah
 - c. Penyesuaian pendekatan dan program serta pengembangan kebijakan dan pemanfaatan agenda yang berbasis bukti pengetahuan dan riset yang berkualitas akan mendorong tercapainya dampak maksimal
- 2. Mendorong peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah (golongan miskin/tidak mampu)**
 - a. Menjamin legalitas kepemilikan aset seperti lahan bagi masyarakat ekonomi kecil
 - b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dilaksanakan oleh masyarakat melalui peningkatan produktivitas penduduk, penciptaan kesempatan kerja, kebijakan '*pro poor*' dan peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Misi I	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan
Tujuan 1.3	Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial
Sasaran 1.3.2	Hadirnya keadilan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan



Strategi

1. Peningkatan akses terhadap perempuan

- a. Penyediaan akses dan bantuan ekonomi bagi kelompok masyarakat khususnya kepala rumah tangga perempuan
- b. Meningkatkan keterlibatan dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di Organisasi Sosial, Kemasyarakatan, Pemerintahan dan Politik

Misi I	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan
---------------	---

Tujuan 1.3	Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial
-------------------	---

Sasaran 1.3.3	Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
----------------------	--



Strategi

- 1. Peningkatan advokasi, sosialisasi dan penegakan hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak**
 - Advokasi pembentukan kelembagaan perlindungan terhadap perempuan dan anak pada semua level pemerintahan
 - Perlindungan bagi perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi
 - Pembinaan, Pendampingan dan Advokasi Pembentukan P2TP2A Kabupaten/Kota
 - Advokasi penyediaan lingkungan Sosial, Pendidikan, Ekonomi dan Rumah Tangga yang ramah terhadap Perempuan dan Anak melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
 - Advokasi pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
- 2. Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender dan anak**

Mewujudkan perencanaan penganggaran responsive gender pada desain program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
- 3. Penyediaan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak secara kontinu**

Misi II **Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty NTT)**

Tujuan 2.1 Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (prime mover)

Sasaran 2.1.1 Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan



Strategi

1. Pembangunan perwilayahan destinasi

- a. Pengembangan '*ring of beauty*' melalui pengembangan Destinasi Pariwisata baru di 22 Kabupaten/Kota dalam konsep Pariwisata Estate yang berbasis masyarakat
- b. Pengembangan daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan terutama Tradisional dan Alam

2. Pembangunan daya tarik wisata

- a. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui Promosi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
- b. Peningkatan Promosi yang dilakukan secara beragam melalui Media Elektronik dan Media Cetak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengembangan pemanfaatan Media Sosial

3. Pembangunan infrastruktur pariwisata

Peningkatan pembangunan sarana prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pariwisata

4. Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat melalui kepariwisataan

- a. Mengedukasi masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata tentang peran dan fungsi, manfaat pariwisata guna merangsang pemanfaatan peluang - peluang yang menguntungkan secara ekonomi
- b. Penetapan peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu Pelayanan Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan Wisata
- c. Pengelolaan Pariwisata yang berbasis masyarakat setempat
- d. Pemerataan arus wisata bagi semua daerah tujuan wisata yang ada di NTT

5. Pembangunan SDM Pariwisata

- a. Peningkatan jumlah SDM di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

6. Pengembangan Investasi pariwisata

- a. Kerjasama antar penyelenggara pariwisata seperti Agen Biro Perjalanan, Pengusaha Jasa Akomodasi dan komponen - komponen terkait lainnya
- b. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pengolahan secara profesional dan mutu pelayanan yang memadai

Misi III

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Tujuan 3.1

Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat

Sasaran 3.1.1

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah

Strategi

- 1. Dukungan terhadap konektivitas nasional untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional**
 - a. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan selama 2 tahun untuk menyelesaikan jalan dengan kondisi mantap sepanjang 2.650 Km
 - b. Keterpaduan dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di semua pulau - pulau besar dengan tetap memperhatikan pengembangan '*tol laut*' yang menjadi strategi pemerintah pusat
 - c. Keterpaduan dalam pengembangan infrastruktur Bandar Udara dengan peningkatan konektivitas antar pulau di NTT dengan provinsi lain termasuk rencana peningkatan fungsi beberapa Bandara di pulau - pulau besar menjadi Bandara Internasional
 - d. Pemanfaatan sumber - sumber pendanaan lainnya seperti Pinjaman Daerah maupun pinjaman oleh Pemerintah Pusat untuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur

Misi III	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
Tujuan 3.1	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat
Sasaran 3.1.2	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Irigasi dan pengairan dalam mendukung perekonomian daerah
Strategi	<p>1. Perkuatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">a. Optimalisasi peran Lembaga Pengelolaan Irigasi di Provinsi dan Kabupatenb. Revitalisasi, Pelatihan dan Sertifikasi Irigasic. Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Petanid. Pengembangan Sistem Informasi Irigasi terpadu dan Sistem Monitoring dan Evaluasie. Percepatan penerbitan aturan- aturan hukum yang mendukung peningkatan pemanfaatan irigasif. Kegiatan Forum - Forum dialog peranan Irigasig. Pengembangan konsep kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten tentang pemanfaatan bendungan serta peningkatan layanan irigasi <p>2. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan irigasi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Peningkatan pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasib. Kerjasama dengan pemerintah pusat dalam Pembangunan Bendungan dan irigasi serta embung berdasarkan kewenanganc. Pengelolaan Sistem Drainase di wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsid. Riset - riset yang berkaitan dengan pengembangan Infrastruktur dan Hidrolika

Misi III

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Tujuan 3.2

meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar

Sasaran 3.2.1

Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak

Strategi

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar

- a. Pengembangan permukiman melalui Peningkatan jumlah Rumah Layak Huni
- b. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dan/atau yang membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya
- c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di perkotaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan peningkatan pelayanan
- d. Pengembangan Sistem Penyediaan Perumahan dan Pemukiman yang serasi dengan Tata Ruang dan terpadu dengan Layanan Infrastruktur Dasar Pemukiman termasuk Sistem Transportasi Publik
- e. Penyelenggaraan sinergi Air Minum dan Sanitasi di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Masyarakat
- f. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur Air Minum dan Sanitasi
- g. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan kualitas infrastruktur strategi
- h. Pengembangan Sistem Perumahan Publik di perkotaan termasuk Kawasan Industri
- i. Pemanfaatan tanah milik negara untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah
- j. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi

Misi III	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
Tujuan 3.2	meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar
Sasaran 3.2.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak
Strategi	2. Mengembangkan strategi pembiayaan alternatif dan skema lainnya <ul style="list-style-type: none">a. Strategi di Bidang Pembiayaan dengan Optimalisasi Pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)b. Optimalisasi Partisipasi Swasta dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kerjasama Pemerintah dan Badan Usahac. Pendataan Pengembang dan Asosiasi Pengembangan Perumahan melalui Sistem Informasi Registrasi Perumahan (SIREG)d. Reformasi subsidi perumahan yang efisien dan berkelanjutan melalui skema subsidi yang progresif termasuk 'passing outskema' subsidi yang tidak tepat sasaran dan membebani keuangan negara dalam jangka panjange. Pengembangan peran BUMD dalam penyediaan perumahanf. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran dan investasi

Misi III

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Tujuan 3.3

Memastikan terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan

Sasaran 3.3.1

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah

Strategi

1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan

- a. Optimalisasi penanganan Sampah, Limbah dan Sungai melalui penyediaan tempat pembuangan sampah terpadu
- b. Mendorong terbentuknya tempat pembuangan sampah (TPA) di setiap Kabupaten
- c. Peningkatan fasilitasi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi
- d. Peningkatan pembangunan Instalasi Air Limbah Domestik di semua Kabupaten
- e. Peningkatan pengelolaan Sampah berbasis komunitas dan pengelolaan limbah berbasis komunitas
- f. Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pembangunan infrastruktur dengan peningkatan manajemen tata kelola pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

2. Penegakan aturan dan regulasi lingkungan

- a. Pelarangan buang sampah ke sungai
- b. Pembinaan dan evaluasi kinerja perusahaan yang berpotensi mengganggu kualitas lingkungan
- c. Optimalisasi sistem pendataan informasi lingkungan hidup dan neraca sumber daya alam serta lingkungan hidup yang handal

Misi III

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Tujuan 3.3

Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan

Sasaran 3.3.2

Menurunnya Emisi gas rumah kaca

Strategi

1. Inventarisasi dan rencana aksi Mitigasi gas rumah kaca

- a. Peningkatan Pembinaan dan penyelenggaraan angkutan umum yang bebas polusi dan penerapan car free day dan smart driving
- b. Pengembangan Sistem jaringan jalan yang ramah pedestrian
- c. Peningkatan pencahayan Ibukota Kabupaten menggunakan "solar cell"
- d. Optimalisasi pengolahan sampah terpadu
- e. Pengembangan dan pengelolaan air limbah dan air limbah komunal melalui penyediaan pengolahan dan pengelolaan air limbah
- f. Peningkatan pembinaan pengembangan dan pengendalian energi dan ketenagalistrikan
- g. Peningkatan pengawasan dan pengendalian industri yang berpotensi mengganggu kualitas lingkungan
- h. Peningkatan penggunaan EBT

Misi III

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Tujuan 3.3 Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan

Sasaran 3.3.3 Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang

Strategi

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki

- a. Meningkatkan peran Rencana Tata Ruang sebagai pedoman dan penguatan ruang provinsi
- b. Optimasi fungsi penguatan lahan dalam kawasan sentra produksi pangan guna menunjang ketahanan pangan nasional
- c. Optimalisasi Keterpaduan antar sektor dalam tata guna lahan pertanian yang mampu meningkatkan kerjasama pemerintah dan stakeholder dalam penataan ruang yang selaras, sinkron dan terpadu dari berbagai rencana dan program lintas sektoral dalam menunjang ketahanan pangan serta pembangunan ekonomi secara menyeluruh

2. Keterpaduan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan Konsistensi kebijakan dan terkendalinya pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang telah ditetapkan

Peningkatan upaya penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang sesuai fungsinya

Misi III

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Tujuan 3.3 Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan

Sasaran 3.3.4 Meningkatnya ketangguhan bencana daerah

Strategi

1. Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat

- a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur Penanggulangan Bencana di daerah serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
- b. Membangun budaya sadar terhadap Pengurangan Resiko Bencana melalui Pelatihan, Pendidikan, Simulasi serta Gladi secara berkala dan berkesinambungan
- c. Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana seperti Peta dan Informasi Spasial, Teknologi terapan dan tepat guna yang berbasis kearifan lokal
- d. Peningkatan penggunaan Teknologi Internet sebagai media untuk Komunikasi, Publikasi, Informasi tentang Jalur Evakuasi, Lokasi Posko dan Pusat - Pusat Pelayanan terdekat
- e. Peningkatan informasi dari seluruh situs Perangkat Daerah (PD) tentang kegiatan yang terkait dengan rencana pembangunan yang terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Bencana (BPB)
- f. Peningkatan penggunaan Teknologi Seluler yang telah diintegrasikan pada Sistem Peringatan Tsunami, Banjir dan Gempa Bumi untuk meningkatkan kecepatan penyampaian pesan kepada masyarakat

2. Memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana

- a. Penerapan Tata Ruang berbasis Mitigasi Bencana
- b. Optimalisasi penerapan Standar Bangunan Tahan Gempa Bumi dan Tsunami terutama untuk Bangunan Publik dan Bangunan Vital
- c. Penetapan jumlah Desa Tangguh Bencana

Misi IV Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan 4.1 Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia NTT yang tinggi dan berdaya saing

Sasaran 4.1.1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing



Strategi

1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata

- **Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan**
- **Meningkatkan Budaya Baca masyarakat lewat Gerakan Membaca 1 jam sehari**
- **Pembinaan dan Pendampingan Sekolah untuk menuju Akreditasi Minimal B bagi SMA, SMK dan SLB**
- **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai melalui berbagai Sumber Pembiayaan (DAK, CSR, APBD Provinsi dan APBN)**
- **Pengembangan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam Membaca, Menulis, Berbicara, Berhitung dalam memecahkan masalah**
- **Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui penyediaan Modul Pembelajaran Wawasan Kebangsaan bagi siswa/i SMA/SMK, Organisasi Kepemudaan, Perguruan Tinggi di wilayah NTT**

2. Peningkatan keberpihakan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu

Misi IV Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan 4.1 Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia NTT yang tinggi dan berdaya saing

Sasaran 4.1.1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing



Strategi

3. Peningkatan pendidikan vokasi dan entrepreneurship

Kerjasama pengembangan Keterampilan siswa SMK di Balai Latihan Kerja untuk menuju SDM unggul melalui Pendidikan Vokasi

Meningkatkan Keterampilan Penduduk Usia Kerja.

Mengoptimalisasi Lembaga-Lembaga Pelatihan dan Sekolah Kejuruan

4. Peningkatan profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Guru

- a. Penyediaan dan distribusi Tenaga Guru Mata Pelajaran tertentu sesuai analisa kebutuhan di setiap Sekolah (SMA, SMK dan SLB)
- b. Penyediaan insentif bagi tenaga guru tidak tetap pada SMK, SMA dan SLB
- c. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SMA, SMK dan SLB

Misi IV Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan 4.1 Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia NTT yang tinggi dan berdaya saing

Sasaran 4.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat NTT



Strategi

1. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Kesehatan

- a. Penyediaan Laboratorium Biomolekuler, sarana prasarana dan tenaga laboran untuk peningkatan ketahanan kesehatan daerah
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan spesifik Lokal (obat herbal dan tradisional)
- c. Pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar dan kebutuhan masing-masing unit layanan rujukan

2. Fasilitas dan Jaminan Kesehatan Nasional tertata dan berkelanjutan

- a. Penyediaan layanan kesehatan bergerak untuk mempermudah layanan kesehatan di destinasi wisata dan DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan)
- b. Memastikan dukungan pembiayaan untuk menuju cakupan layanan kesehatan yang menyeluruh 100% (UHC = Universal Health Care 100%)
- c. Meningkatkan Upaya Layanan Kesehatan melalui Fasilitasi Layanan Rujukan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) sampai ke Rumah Sakit rujukan Provinsi
- d. Penyediaan dan distribusi tenaga medis (Dokter, perawat, bidan dan tenaga gizi) untuk fasilitas layanan rujukan
- e. Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang memadai dalam jenis, jumlah, kualitas dan distribusi
- f. Perbaikan sistem dan Peningkatan kualitas layanan kesehatan
- g. Memastikan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil dan Remaja Putri dalam rangka pencegahan dan penanganan Stunting, Gizi Kurang dan Gizi Buruk
- h. Memastikan layanan kesehatan dan koordinasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam rangka mengurangi angka kelahiran total

3. **Peningkatan Pemahaman dan Perilaku Hidup Sehat**

Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

4. **Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Percepatan penurunan stunting terintegrasi

Misi IV Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan 4.1 Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia NTT yang tinggi dan berdaya saing

Sasaran 4.1.3 Meningkatkan kualitas Pemuda dan prestasi keolahragaan



Strategi

1. Pengembangan Kepemudaan

- a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan dalam rangka meningkatkan keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda melalui dukungan, kesempatan, pelatihan, pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berjiwa Wirausaha, Produktif, Berprestasi dan Bertanggung jawab

2. Pengembangan keolahragaan

- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk peningkatan prestasi.
- b. Pembinaan Cabang Olahraga Potensial, Tradisional dan Rekreasi untuk mendukung prestasi dan pengembangan pariwisata daerah

Misi V Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan 5.1	Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Publik yang Baik
Sasaran 5.1.1	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif



Strategi

1. Peningkatan Akuntabilitas Daerah dan Pelayanan Publik

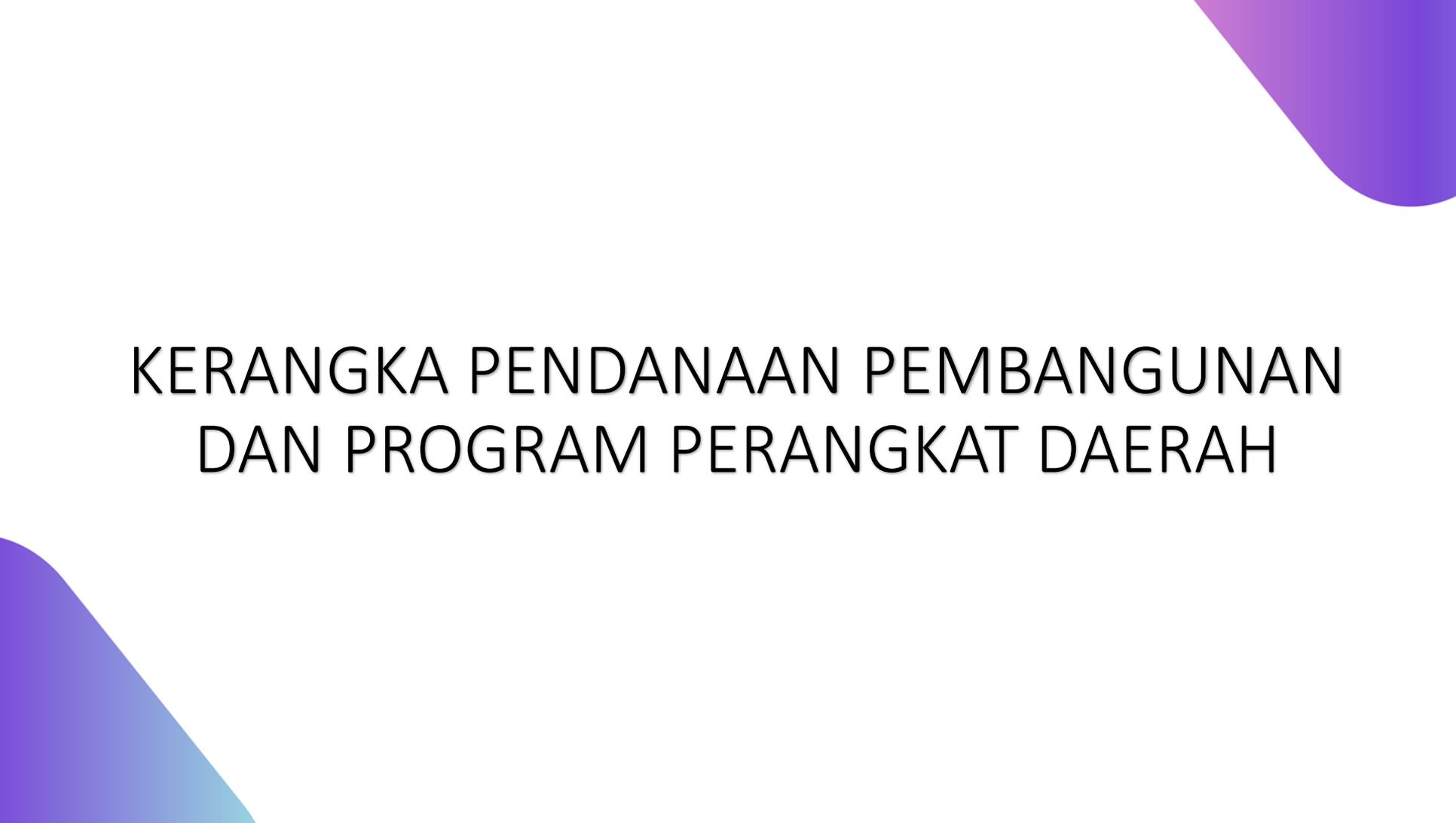
- a. Penerapan e-Gov yang terintegrasi
- b. Penerapan e-Gov dan penyusunan data terpadu (1 Data 1 Peta)
- c. Mengembangkan Sistem Pelayanan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan yang handal terpercaya dan terjangkau masyarakat luas
- d. Penataan Sistem dan Proses kerja pemerintah secara holistik dengan memanfaatkan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
- e. Menjamin keterbukaan informasi publik
- f. Mewujudkan perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan e-Gov

2. Reformasi Regulasi

- a. Memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan sesuai regulasi melalui aplikasi berbasis web
- b. Penyusunan standar pelayanan dan operasional prosedur untuk setiap alur kerja layanan pemerintahan
- c. Penetapan indikator kinerja dan target kinerja yang realistis dan terukur sebagai dasar penentuan pemberian tunjangan kinerja

3. Peningkatan kapasitas SDM

- a. Mengembangkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Meningkatkan keselarasan, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah
- c. Pemberian Tunjangan Kinerja bagi aparatur sipil negara dalam rangka peningkatan profesionalitas
- d. Rekrutmen pejabat melalui mekanisme assessment centre, seleksi terbuka dan manajemen talent pool
- e. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- f. Penerapan role model, agen perubahan dan budaya kerja
- g. Rekrutmen PNS berdasarkan analisa kebutuhan dan penempatan PNS pada jabatan sesuai hasil pemetaan kompetensi
- h. Mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi melalui peran serta dunia usah
- i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan melalui ketersediaan dan penguatan kapasitas SDM yang handal serta sarana prasarana yang memadai
- j. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD



KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN STRUKTUR APBD

sesuai PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



PERUBAHAN TARGET PAD

URAIAN	TARGET					
	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.185.572.496.77₁	3.062.141.306.222	3.667.052.934.485	1.605,942.040.93₆	2.212,635.953.007	3.229,352.276.426
Pajak Daerah	1.006.051.643.38 ₈	1.074.463.155.138	1.171.164.639.100	1.040,291.519.18 ₇	1.375,708.488.765	1.870.374.846.155
Retribusi Daerah	938.408.844.341	1.738.408.844.341	2.238.408.844.341	170,08.379.800	204.130.055.760.	224.543.061.336
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	87.122.457.500	89.736.110.625	91.979.513.391	111.774.034.063	162.072.349.391	259,15.759.025
Lain-lain PAD Yang Sah	153.989.571.542	159.533.196.118	165.499.757.653	283.266.107.886	470.225.059.091	874,618.609.910

PERUBAHAN PROGRAM

SEBELUM PERUBAHAN

- Setiap PD melaksanakan 3 program rutin PD
- Masing-masing PD melaksanakan hanya 1 program PD, sehingga total terdapat 39 program urusan sesuai dengan jumlah perangkat daerah
- Beberapa PD melaksanakan program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera, atau melaksanakan sekaligus kedua program tersebut
- Hibah dan Bansos dilaksanakan melalui Badan Keuangan

SETELAH PERUBAHAN

- Setiap PD melaksanakan 1 program rutin, yaitu program penunjang urusan pemerintahan
- Satu PD bisa melaksanakan lebih dari 1 program, bahkan ada PD yang melaksanakan 19 program
- Program NTT Bangkit dan NTT Sejahtera melebur dalam program sesuai nomenklatur Permendagri 90/2019 tetapi tetap dilandasi semangat NTT Bangkit NTT Sejahtera karena indikatornya tetap, dengan perubahan seperlunya
- Hibah dan bansos langsung melekat pada masing-masing PD

PERUBAHAN JUMLAH PROGRAM PER PD sesuai urusan (1)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 program	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8 program
2.	Dinas Kesehatan	2 program	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil	5 program
3.	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes		RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes	1 Program
4.	Dinas PUPR	2 program	Dinas PUPR	19 program
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	1 program	Satuan Polisi Pamong Praja	2 program
6.	Dinas Sosial	1 program	Dinas Sosial	6 program
7.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2 program	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8 program
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 program	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6 program
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	4 program

PERUBAHAN JUMLAH PROGRAM PER PD sesuai urusan (2)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM
10.	Dinas Perhubungan	2 program	Dinas Perhubungan	3 program
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 program	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 program
12.	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu pintu	1 program	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu pintu	5 program
13.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2 program	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3 program
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2 program	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4 program
15.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3 program	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7 program

PERUBAHAN JUMLAH PROGRAM PER PD sesuai urusan (3)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM
21.	Dinas Perindag	2 program	Dinas Perindag	9 program
22.	Inspektorat Daerah	1 program	Inspektorat Daerah	2 program
23.	Bappelitbangda	1 program	Bappelitbangda	3 program
24.	Badan Keuangan Daerah	1 program	Badan Keuangan Daerah	1 program
25.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1 program	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2 program
26.	Badan Kepegawaian Daerah	1 program	Badan Kepegawaian Daerah	1 program
27.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1 program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1 program
28.	Badan Penghubung	1 program	Badan Penghubung	1 program
29.	Badan pengelola Perbatasan Daerah	1 program	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1 program
	<i>Sekretariat Daerah</i>		<i>Sekretariat Daerah</i>	
30.	Biro Pemerintahan	1 program	Biro Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Kerja Sama	2 program
31.	Biro Hukum	1 program	Biro Hukum	1 program

PERUBAHAN JUMLAH PROGRAM PER PD sesuai urusan (4)

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM
32.	Biro Perekonomian dan Kerja Sama	1 program	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	1 program
33.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1 program	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1 program
34.	Biro Organisasi	1 program	Biro Organisasi	1 program
35.	Biro Umum	1 program	Biro Umum	1 program
36.	Biro Humas dan Protokol	1 program	Biro Administrasi Pimpinan	1 program
37.	Sekretariat DPRD	1 program	Sekretariat DPRD	1 program
38.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 program	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 program
39.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 program	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 program
	Jumlah	59 Program	Jumlah	138 Program



RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PEMERINTAH PROVINSI NTT
TAHUN 2023



- Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2018-2023
- Penyusunan RKPD 2023 disusun dalam kondisi pasca pandemik Covid 19 yang sedang melanda dunia dan Indonesia. Kondisi ini telah berdampak pada capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 yang tentunya akan mempengaruhi penetapan target kinerja tahun 2023
- RKPD 2023 selain berpedoman pada RPJMD perubahan tahun 2018-2023 juga berpedoman pada RKP 2023, sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2023
- RPJPD 2005 – 2025 mengusung visi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 Yaitu :**“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”** dimana periode 2018 – 2023 merupakan periode pembangunan tahap ke-4, atau tahap akhir RPJPD 2005-2025
- Arah kebijakan periode keempat adalah : **Percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas.**
- Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 yaitu : **Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lokal.**

DASAR HUKUM

1

UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

2

UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

3

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

4

PERMENDAGRINOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG
TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI
RAN PERDATENTANG RPJPD DAN RPJMD, SERTA TATA CARA
PERUBAHAN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD

5

PERMENDAGRINOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN
DAERAH

6

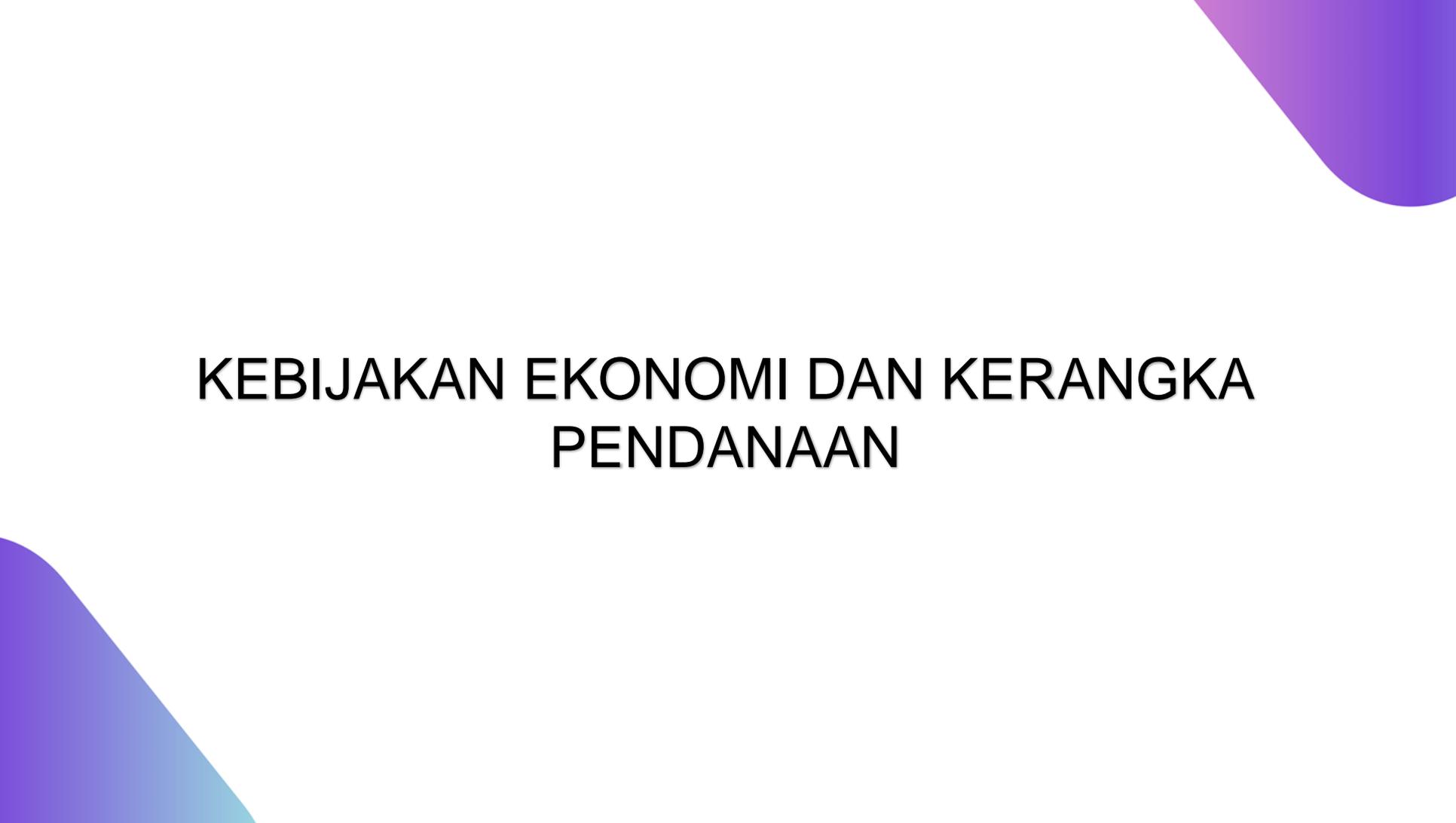
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2005-2025

7

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

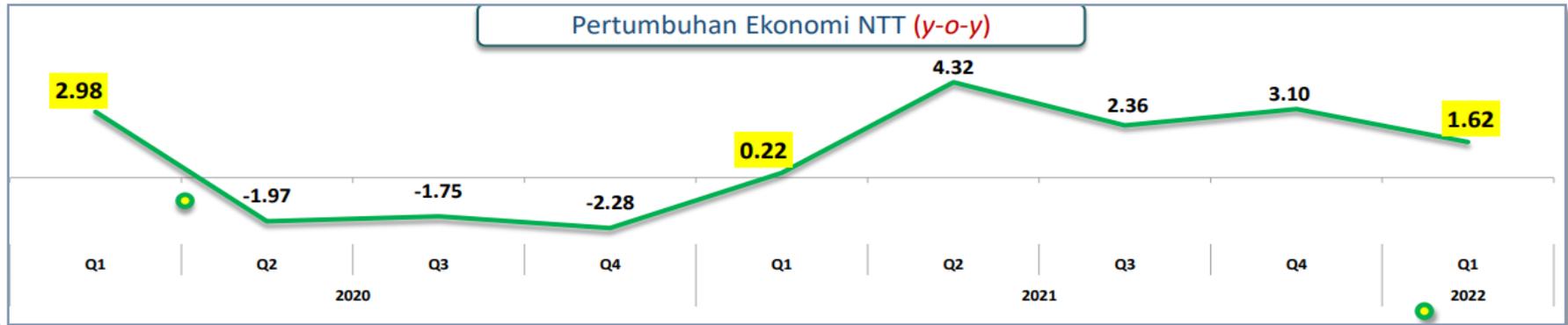
Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			
			2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,24	-0,83 (c to c) – (pertumbuhan kumulatif)	3,10
2	Angka kemiskinan	%	21,03	20,62	21,21	20,44
3	Inflasi	%	3,07	0,67	0,61 (y on y)	1,67
4	IPM	poin	64,39	65,23	65,19	65,28
5	Usia Harapan Hidup	tahun	66,38	66,85	67,01	67,15
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,30	7,55	7,63	7,69
7	TPT	%	3,01	3,35	4,28	3,77
8	Indeks Gini	poin	0,351	0,356	0,356	0,339



KEBIJAKAN EKONOMI DAN KERANGKA PENDANAAN

Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022



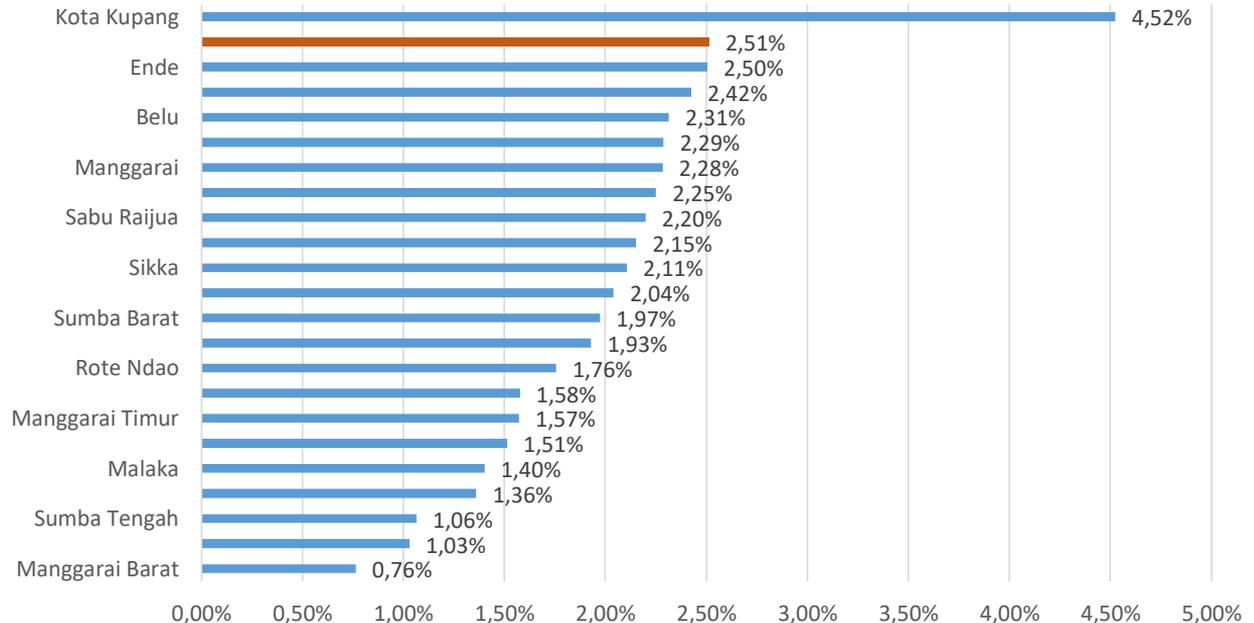
PERTUMBUHAN EKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI KAB/KOTA DI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 (c to c)

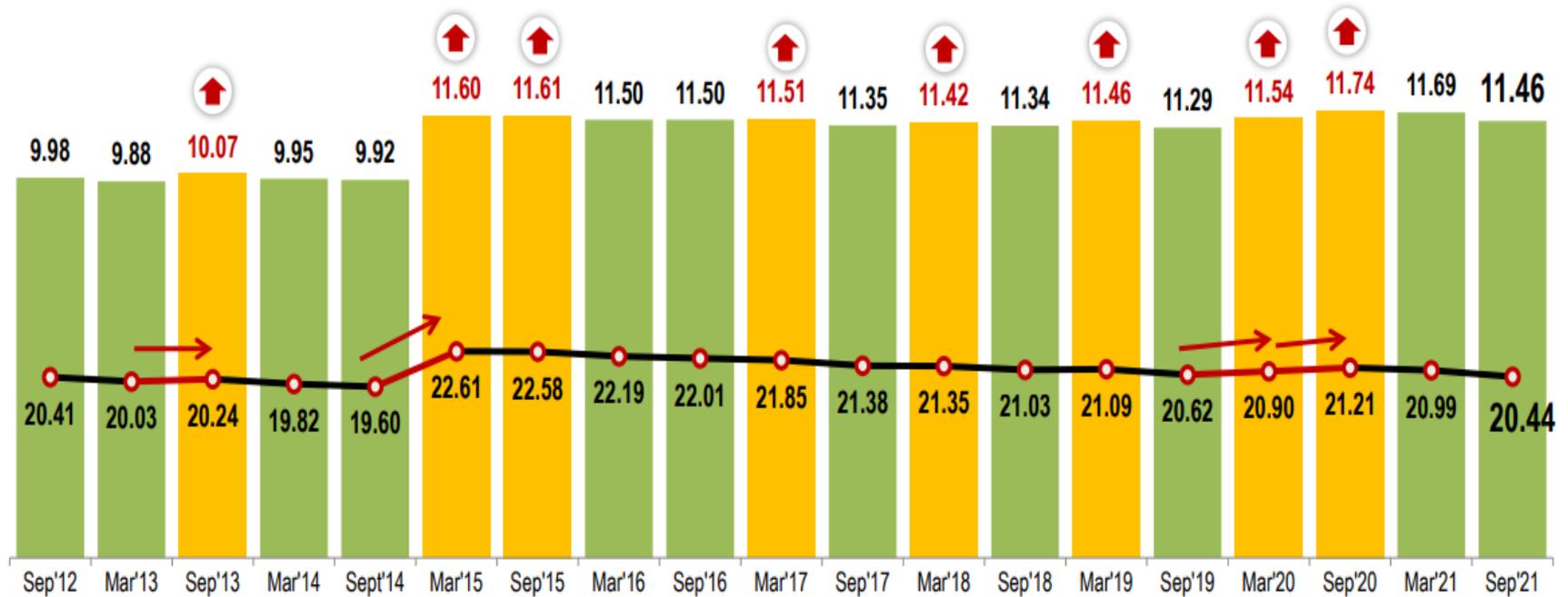
Ekonomi NTT pada tahun 2021

Seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur tumbuh positif pada tahun 2021 dengan pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Kota Kupang yang tumbuh sebesar 4,52%, diikuti Ende (2,50%), dan Sumba Timur (2,42%). sementara Kab. Manggarai Barat tercatat mengalami pertumbuhan terkecil (0,76%) diikuti Flores Timur (1,03%) dan Sumba Tengah (1,06%)

Ekonomi Nusa Tenggara Timur mulai tumbuh sebesar 2,51% pada tahun 2021 (c to c) setelah sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020



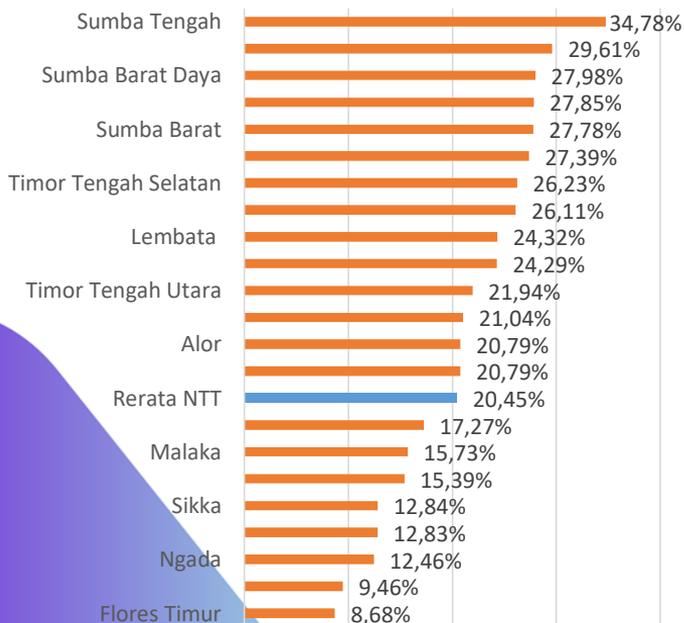
Perkembangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur September 2012 - September 2021



KEMISKINAN

SITUASI KEMISKINAN DI NTT

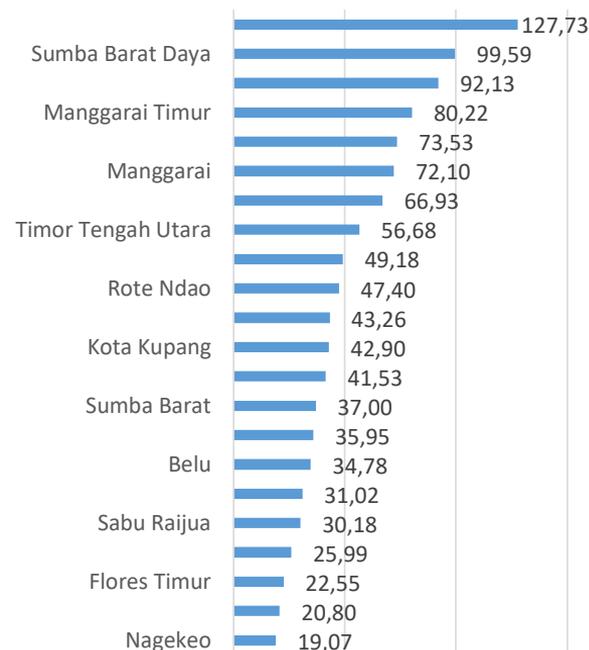
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN BERDASARKAN KAB/KOTA DI NTT TAHUN 2021 (%)



Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin NTT adalah sebesar 20,45% dengan total jumlah penduduk miskin mencapai 1.150,53 ribu jiwa. Kabupaten dengan Jumlah penduduk miskin terbesar di NTT pada tahun 2021 adalah TTS (127,72 ribu jiwa), Sumba Barat Daya (99,59 ribu jiwa) dan Kabupaten Kupang (92,13 ribu jiwa), sedangkan Nagekeo, Ngada dan Flores Timur tercatat memiliki penduduk miskin terkecil dengan jumlah masing-masing 19,07 ribu jiwa, 20,80 ribu jiwa dan 22,55 ribu jiwa

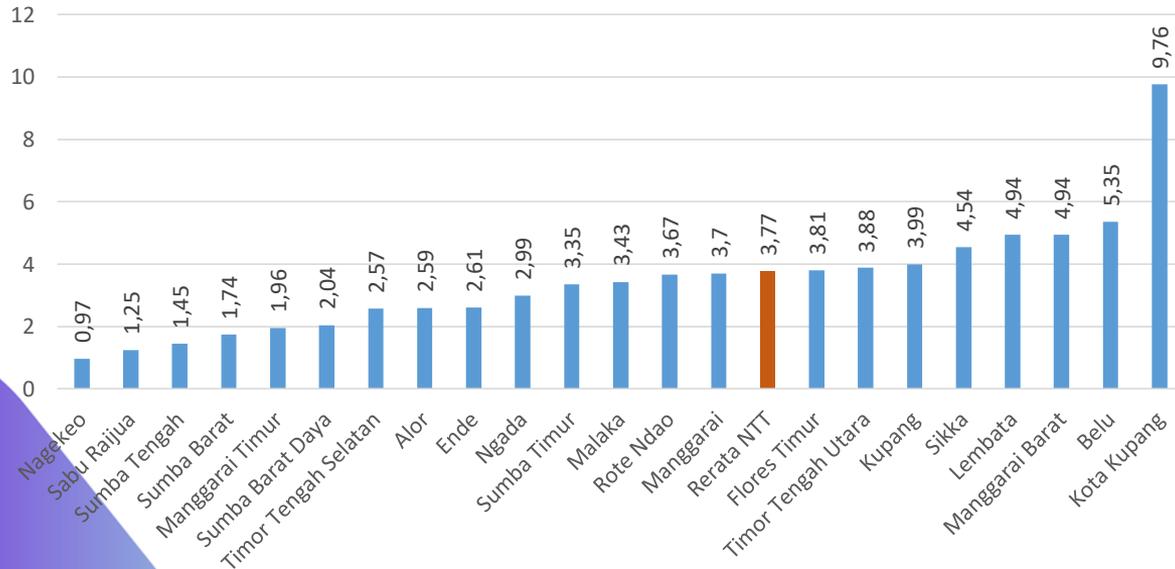
Sumba Tengah tercatat memiliki persentase penduduk miskin terbesar di tahun 2021 sebesar 34,78% diikuti Sabu Raijua (29,98%) dan Sumba Barat Daya (27,98%), sementara Flores Timur, Kota Kupang dan Ngada tercatat memiliki persentase penduduk miskin terkecil pada tahun 2021 masing-masing sebesar 8,68%, 9,46% dan 12,46%.

JUMLAH PENDUDUK MISKIN BERDASARKAN KAB/KOTA DI NTT (RIBU JIWA) TAHUN 2021



PENGANGGURAN

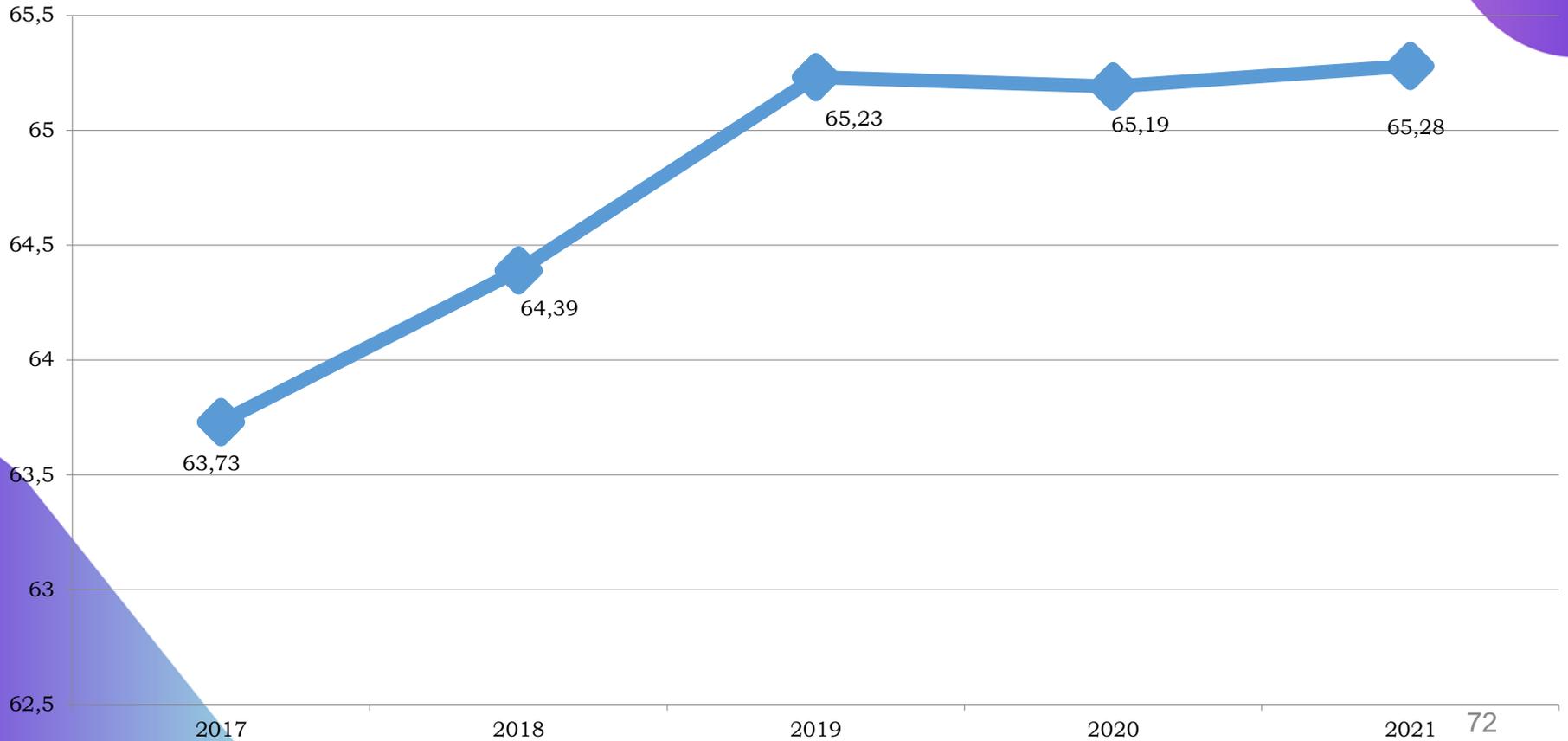
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PADA KAB/KOTA SE NTT
TAHUN 2021



TPT DI NTT

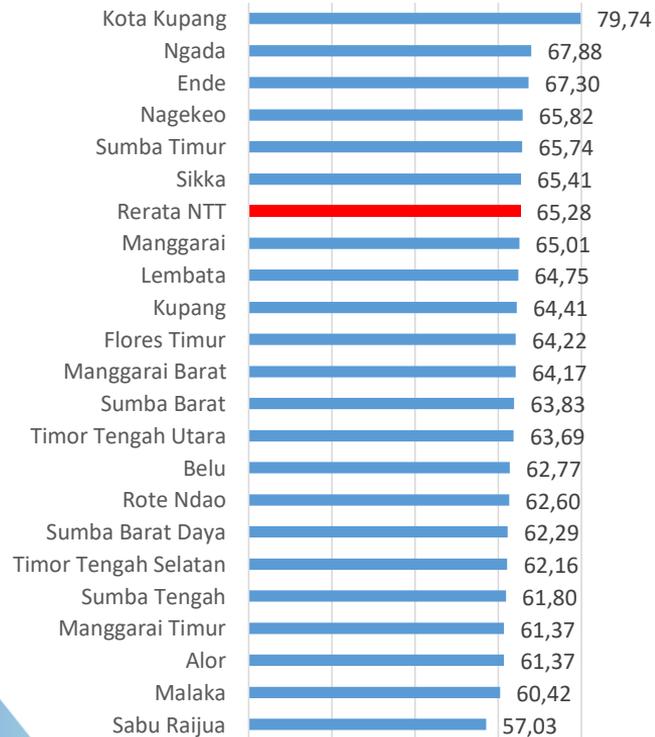
Pada tahun 2021 TPT NTT mencapai 3,77%, Kota Kupang tercatat memiliki TPT tertinggi sebesar 9,76 sementara Nagekeo memiliki TPT terendah sebesar 0,97%

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021



IPM

Indeks Pembangunan Manusia pada Kab/Kota di NTT tahun 2021



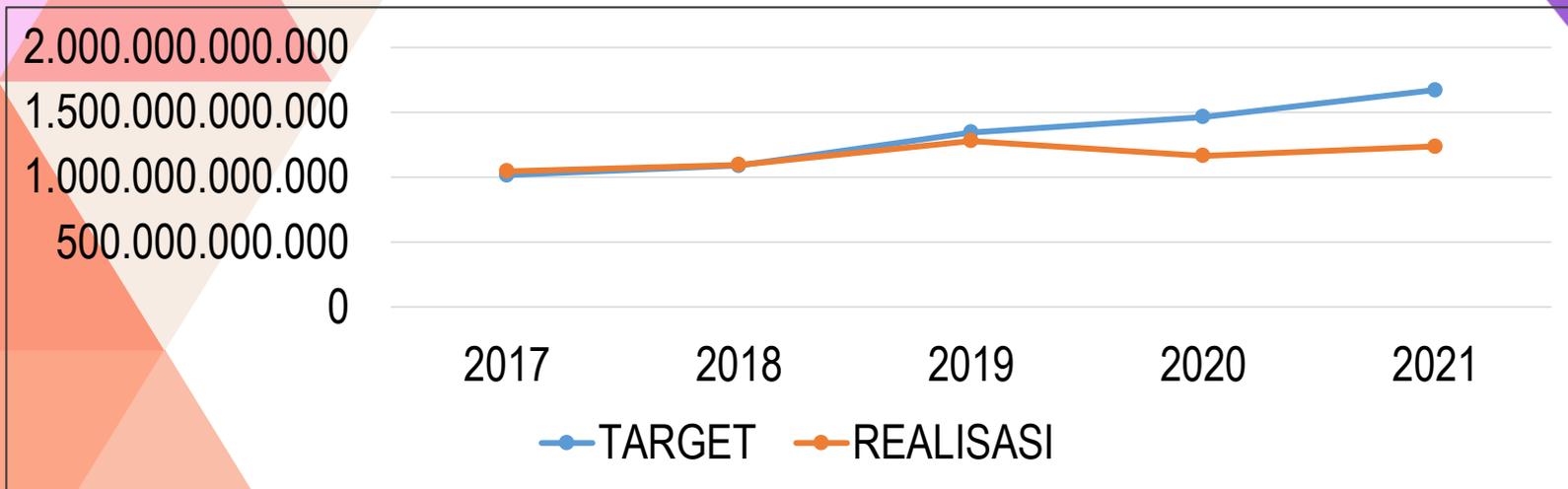
IPM DI NTT

Pada tahun 2021, IPM NTT tercatat sebesar 65,28%. 6 Kabupaten/kota menyandang skor yang lebih tinggi dari rerata NTT yaitu Kota Kupang, Ngada, Ende, Nagekeo, Sumba Timur dan Sikka, sementara kabupaten lainnya memiliki skor IPM yang lebih rendah dari rerata NTT. Sabu Raijua pada tahun 2021 merupakan Kabupaten dengan IPM terendah di NTT dengan besaran IPM mencapai 57,03

Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2018-2021

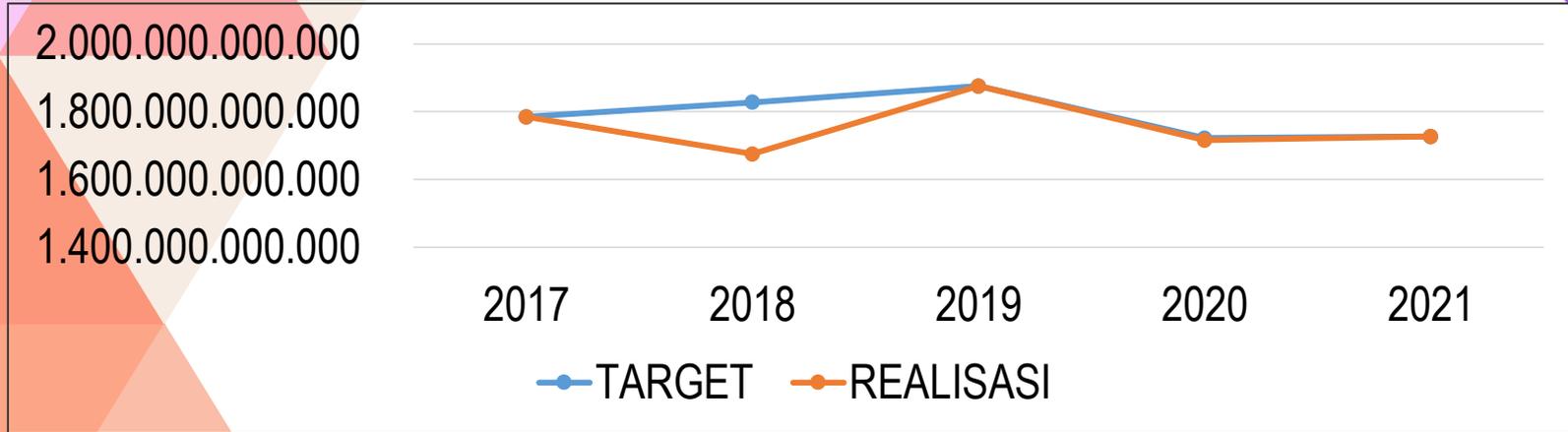
URAIAN	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN	4.507.833.810.597	5.354.092.405.679	5.419.935.156.637	5.312.446.872.609
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.092.895.995.481	1.258.958.953.288	1.166.570.596.936	1.238.032.648.889
Pendapatan Pajak Daerah	866.157.779.773	908.207.117.663	924.189.837.048	925.862.559.388
Pendapatan Retribusi Daerah	27.570.244.733	60.831.986.435	34.959.171.078	69.890.857.732
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	72.415.455.930	70.662.452.308	65.135.467.630	64.982.172.050
Lain-lain PAD Yang Sah	126.752.515.045	219.257.396.882	142.286.121.181	177.297.059.718
PENDAPATAN TRANSFER	3.409.611.357.280	4.067.952.844.498	4.171.362.593.723	4.000.655.446.445
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.409.611.357.280	4.067.952.844.498	4.152.039.227.723	4.000.655.446.445
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			19.323.366.000	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.326.457.836	27.180.607.893	82.001.965.978	73.758.777.275
Pendapatan Hibah	5.326.457.836	27.180.607.893	82.001.965.978	73.758.777.275

TREND PENDAPATAN ASLI DAERAH



TAHUN	TARGET	REALISASI	
2017	1.016.023.429.000	1.047.491.567.027	103,10%
2018	1.090.450.085.602	1.095.269.978.577	100,44%
2019	1.345.841.709.148	1.280.122.363.490	95,12%
2020	1.465.773.875.091	1.166.570.596.936	79,59%
2021	1.672.063.318.672	1.238.032.648.889	74,04%

TREND PENDAPATAN TRANSFER (DANA ALOKASI UMUM)



TAHUN	TARGET	REALISASI	
2017	1.784.462.326.000	1.784.462.326.000	100,00%
2018	1.827.412.640.000	1.675.128.259.000	91,67%
2019	1.875.182.301.000	1.875.182.301.000	100,00%
2020	1.722.181.082.000	1.716.206.146.000	99,65%
2021	1.726.712.089.000	1.726.712.089.000	100,00%

A. KEBIJAKAN PENDAPATAN

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

- a) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
- b) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- c) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
- d) Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah.
- e) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
- f) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
- g) Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik.
- h) Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel.
- i) Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik.
- j) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.
- k) Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
- l) Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah

2. PENDAPATAN TRANSFER

- a) Mengupayakan peningkatan DAU untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar.
- b) Mengupayakan peningkatan DAU untuk membiayai insentif tenaga kesehatan yang sebelumnya ditanggung dalam APBN, alokasi untuk pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, alokasi untuk kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
- c) Mengupayakan peningkatan DAU untuk membiayai gaji PPPK baik tenaga pendidik maupun tenaga teknis lainnya.
- d) Penyiapan usulan DAK tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan teknis.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Strategi percepatan pelaksanaan program kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan

RINCIAN PENDAPATAN DAERAH

NO	URAIAN	APBD MURNI 2022	RANCANGAN KUA PPAS 2023	+/-
	PAJAK			
1	PKB	579.499.665.592	494.519.393.435	(84.980.272.157)
2	BBNKB	239.335.748.560	237.895.054.700	(1.440.693.860)
3	PBBKB	284.240.647.622	292.745.886.685	8.505.239.063
4	PAP	1.000.000.000	1.000.000.000	-
5	PAJAK ROKOK	382.105.040.470	382.105.040.470	-
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.083.127.863	75.982.172.050	32.899.044.187
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH			
1	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	121.361.271.225	126.500.000.000	5.138.728.775
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.381.566.463	6.381.566.463	-
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.521.300.415	2.986.966.110	(4.534.334.305)
4	PPKD	50.985.733.000	32.450.437.770	(18.535.295.230)
5	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	24.111.400.122	13.274.123.338	(10.837.276.784)
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	6.600.000	6.600.000

PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH PER PD

NO	URAIAN	APBD MURNI 2022	RANCANGAN KUA PPAS 2023	+/-
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.653.607.250	1.750.000.000	(5.903.607.250)
2	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.266.650.000	11.000.000.000	(266.650.000)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.500.000.000	1.750.000.000	250.000.000
4	Dinas Sosial	519.200.000	500.000.000	(19.200.000)
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000	100.000.000	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	32.684.000.000	33.000.000.000	316.000.000
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.450.000	85.450.000	-
8	Dinas Perhubungan	9.652.000.000	9.500.000.000	(152.000.000)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000	60.000.000	-
10	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.200.000	350.000.000	(200.000)
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000	500.000.000	400.000.000
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37.000.000	37.000.000	-
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	23.000.000.000	23.000.000.000	-
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	505.950.000	600.000.000	94.050.000
15	Dinas Peternakan	16.478.373.000	16.500.000.000	21.627.000
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.872.244.000	8.000.000.000	127.756.000
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.310.900.000	1.500.000.000	189.100.000
18	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	3.595.032.000	3.500.000.000	(95.032.000)
19	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2.627.950.000	2.500.000.000	(127.950.000)
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	64.872.210.983	70.000.000.000	5.127.789.017
21	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	45.000.000	100.000.000	55.000.000
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.000.000	12.000.000	-
	TOTAL	184.327.767.233	184.344.450.000	16.682.767

Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Pendapatan Daerah TA.2022 – 2024

KODE	URAIAN	2022	Proyeksi 2023	Prakiraan Maju 2024
4.	PENDAPATAN	5.063.892.995.871	4.920.900.982.145	5.171.608.213.821
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.953.268.545	1.702.462.761.636	1.872.709.037.800
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.486.181.102.224	1.333.319.488.605	1.466.651.437.466
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	184.327.767.233	80.199.638.832	88.219.602.715
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.083.127.863	68.250.000.000	75.075.000.000
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	210.361.271.225	220.693.634.199	242.762.997.619
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.133.743.302.000	3.212.086.884.550	3.292.389.056.664
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.133.743.302.000	3.212.086.884.550	3.292.389.056.664
4.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.196.425.326	6.351.335.959	6.510.119.358
4.3.1.	Pendapatan Hibah	6.196.425.326	6.351.335.959	6.510.119.358

Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2021

KODE	URAIAN	2018	2019	2020	2021
5.	BELANJA	4.846.839.267.378	5.277.064.650.987	5.755.258.016.194	5.508.767.906.133
5.1.	BELANJA OPERASI	3.885.700.364.571	3.958.664.698.490	4.022.397.290.093	4.061.962.995.626
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.299.772.084.613	1.442.966.171.685	1.444.646.968.075	1.608.464.234.033
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	953.324.710.208	1.194.831.892.392	1.221.574.013.528	1.078.288.386.249
5.1.3.	Belanja Bunga			5.875.483.690	17.483.698.422
5.1.5.	Belanja Hibah	1.611.082.006.586	1.291.513.467.414	1.329.334.450.800	1.347.483.386.922
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	21.521.563.164	29.353.167.000	20.966.374.000	10.243.290.000
5.2.	BELANJA MODAL	529.761.034.603	798.224.255.845	1.026.785.278.415	903.257.622.800
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	852.255.000	30.000.000		147.952.000
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.493.090.879	116.636.579.503	202.160.307.478	185.901.613.833
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.802.530.521	139.208.422.686	177.836.474.130	135.344.543.385
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	252.448.197.953	472.361.496.339	504.964.198.116	572.412.496.697
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.164.960.250	69.987.757.317	141.824.298.691	9.451.016.885
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	125.185.304	1.490.608.760	240.938.915.874	135.775.036.685
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	125.185.304	1.490.608.760	240.938.915.874	135.775.036.685
5.4.	TRANSFER	431.252.682.900	518.685.087.892	465.136.531.812	407.772.251.022
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	427.541.748.500	515.982.681.892	460.136.531.812	397.772.251.022
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	3.710.934.400	2.702.406.000	5.000.000.000	10.000.000.000

STRUKTUR PENDAPATAN RANCANGAN APBD TA. 2023

NO	OPD	APBD MURNI 2022	RANCANGAN KUA PPAS 2023	+/-
4	PENDAPATAN DAERAH	5.060.282.355.991	5.068.892.995.891	8.610.639.900
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.953.268.565	1.928.953.268.565	5.000.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	1.486.181.102.244	1.408.265.375.290	(77.915.726.954)
4.1.02	Retribusi Daerah	184.327.767.233	184.344.450.000	16.682.767
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.083.127.863	75.982.172.050	32.899.044.187
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	210.361.271.225	260.361.271.225	50.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.130.132.662.100	3.133.743.302.000	3.610.639.900
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.130.132.662.100	3.133.743.302.000	3.610.639.900
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.196.425.326	6.196.425.326	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.196.425.326	6.196.425.326	-
	TOTAL PENDAPATAN	5.060.282.355.991	5.068.892.995.891	8.610.639.900

B. KEBIJAKAN BELANJA

1. Membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menunjang pencapaian prioritas dan sasaran P-RPJMD 2018-2023 dengan kriteria :
 - a. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - b. Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. Membiayai visi misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur
 - Membiayai rekrutmen PPPK untuk formasi tenaga kependidikan dan tenaga teknis lainnya;
 - Program TJPS-PK (Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan);
 - Program Pariwisata Estate;
 - penanganan Kemiskinan Ekstrim;
 - Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Daerah;
 - Pengembangan Komoditi Kelor, Bambu dan Sapi Wagyu
 - d. Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2022, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK;
 - e. Kerjasama antar pemerintah daerah;
 - f. Membayar bunga dan pokok pinjaman PEN Daerah yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi;
 - g. Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.

B. KEBIJAKAN BELANJA

2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
3. Pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi
4. Memenuhi arahan dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya Meliputi :
 - a. Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi
 - b. Pendanaan untuk pembayaran insentif
5. Memenuhi kewajiban terkait perjanjian Pinjaman PEN dengan PT. SMI

PERKIRAAN PENGELUARAN PASTI TA. 2023 BERDASARKAN SUMBER DANA

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.451.389.310.783
Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	3.060.423.000
Gaji dan Tunjangan DPRD Provinsi NTT	62.502.905.000
Insentif Pemungutan Pajak	34.215.143.545
Rutin Kantor	56.978.414.700
Gaji, BPJS Kesehatan, Kematian dan Kecelakaan Tenaga Kontrak	165.056.010.660
PBIJK APBD dan APBN	113.455.810.589
Belanja Bagi Hasil	692.619.983.449
Pembentukan Dana Cadangan	107.975.165.908
TPP	239.188.395.530
SISA PAD	453.901.016.184
DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.730.933.330.000
Gaji dan Tunjangan ASN	1.366.703.359.358
Bunga Pinjaman PEN	64.810.901.393
Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Daerah	65.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	111.014.055.620
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.932.135.667
SISA DAU	109.472.877.962
SISA PAD + DAU	563.373.894.146

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	Operasional Juru Pelihara Cagar Budaya 76 Org	729.600.000
2	Instruktur Olahraga SKO 16 Org	307.200.000
3	Operasional Pegawai Sekolah 100 Org	300.000.000
4	Operator Dapodik 929 Org (@150.000)	1.672.200.000
5	Tamsil Komite Yayasan 4.601 Org (@400.000)	22.084.800.000
6	Belanja BLUD RSUD	126.500.000.000
7	Belanja BLUD Dinas PUPR	6.381.566.463
8	Belanja BLUD Tenaga OP	5.200.000.000
9	Komda Lansia	350.000.000
10	Hibah Garamin	50.000.000
11	Tagana	988.800.000
12	Bambu	1.000.000.000
13	Operasional Lab	500.000.000
14	Operasional Limbah	2.000.000.000
15	Desa Model	5.000.000.000
16	KPID, KIPD	1.000.000.000
17	Internet Kominfo	108.000.000
18	Pramuka	750.000.000
19	KONI	3.000.000.000

NO	URAIAN	ANGGARAN
20	Paskibraka	1.000.000.000
21	Pariwisata Estate	1.500.000.000
22	Sapi Wagyu	1.000.000.000
23	Operasional Upt Veteriner	500.000.000
24	Operasional Upt Pembibitan Ternak	3.500.000.000
25	TJPS, Stunting (KRPL)	2.662.000.000
26	Kelor TNI	1.000.000.000
27	Operasional Sertifikasi	200.000.000
28	Operasional Proteksi	50.000.000
29	Operasional Perbenihan	50.000.000
30	Operasional Kebun Dinas	50.000.000
31	Dekranasda	1.000.000.000
32	Operasional Upt Pengujian Perindag	100.000.000
33	Outsourcing	1.321.320.000
34	Kegiatan Biro Umum	35.404.557.500
35	Penyelesaian Aset	150.000.000
36	Analisa Jabatan	100.000.000
37	Komisi AIDS	200.000.000
38	PMI	200.000.000

NO	URAIAN	ANGGARAN
39	Bantuan Pendidikan Mahasiswa	874.000.000
40	Kementerian Perhubungan	126.000.000
41	Lembaga Keagamaan Dan Lembaga Sosial	750.000.000
42	Penjabat Kepala Daerah	1.000.000.000
43	Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	73.118.788.450
44	Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.648.367.250
45	Kegiatan Badan Keuangan Daerah	17.991.008.045
46	Besipae	1.500.000.000
47	Kegiatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah	17.747.278.755
48	Kegiatan Kepegawaian	3.500.000.000
49	Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	28.641.605.057
50	Kegiatan Perbatasan	600.000.000
51	Kegiatan Penghubung	3.100.000.000
52	Kegiatan Inspektorat	7.100.000.000
53	Hibah Parpol	2.676.820.800
54	FKUB	250.000.000
55	KPU & BAWASLU	700.000.000
56	Forkompinda	3.000.000.000
57	Operasional SKO	4.238.000.000

NO	URAIAN	ANGGARAN
58	Insentif Covid RSUD	3.500.000.000
59	Operasional RSUD	64.421.585.300
60	Insentif Covid Dinkes	1.500.000.000
61	Stunting (Dinkes)	4.000.000.000
62	SPM	3.000.000.000
63	Operasional Labkes	1.000.000.000
64	Operasional Latnakes	500.000.000
65	Operasional RSJ Naimata	4.500.000.000
66	Pemeliharaan dan Perencanaan Infrastruktur PUPR	3.000.000.000
67	Honor Jaga (Satpol-PP)	1.129.500.000
68	Kemiskinan Ekstrim	4.000.000.000
69	Panti Tuna Netra	2.867.647.882
70	Panti Lanjut Usia	2.455.712.630
71	Panti Anak	4.860.432.150
72	Belanja Tidak Terduga	67.219.495.055
73	TPP	239.188.395.530
	TOTAL	563.373.894.146

Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - 2024

KODE	URAIAN	Target 2022	Proyeksi 2023	Prakiraan Maju 2024
5.	BELANJA	5.595.612.615.524	4.699.584.859.811	4.777.292.091.487
5.1.	BELANJA OPERASI	3.618.530.670.704	3.580.602.254.559	3.618.530.670.704
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.736.539.785.862	1.736.539.785.862	1.736.539.785.862
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.517.136.645.797	1.479.208.229.652	1.517.136.645.797
5.1.3.	Belanja Bunga	82.584.501.105	82.584.501.105	82.584.501.105
5.1.5.	Belanja Hibah	239.507.389.940	239.507.389.940	239.507.389.940
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	42.762.348.000	42.762.348.000	42.762.348.000
5.2.	BELANJA MODAL	1.324.558.691.975	428.420.483.245	468.199.298.776
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	-	-	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.502.962.647	34.955.796.293	34.955.796.293
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	194.663.982.540	145.997.986.905	145.997.986.905
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	989.516.835.788	247.379.208.947	287.158.024.478
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	874.911.000	87.491.100	87.491.100
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	32.355.619.337	32.355.619.337	32.355.619.337
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	32.355.619.337	32.355.619.337	32.355.619.337
5.4.	TRANSFER	620.167.633.508	658.206.502.670	658.206.502.670
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	602.238.993.608	640.277.862.770	640.277.862.770
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	17.928.639.900	17.928.639.900	17.928.639.900

STRUKTUR BELANJA RANCANGAN APBD TA. 2023

NO	OPD	APBD MURNI 2022	RANCANGAN APBD 2023	+/-
5	BELANJA	5.486.764.678.209	4.840.131.370.695	(646.633.307.514)
5.1	BELANJA OPERASI	3.502.757.739.959	3.491.044.321.522	(11.713.418.437)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.704.120.305.504	2.017.561.333.818	313.441.028.314
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.442.349.308.976	1.286.744.192.926	(155.605.116.050)
5.1.03	Belanja Bunga	82.584.501.105	64.810.901.393	(17.773.599.712)
5.1.05	Belanja Hibah	220.961.703.374	116.705.514.385	(104.256.188.989)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	52.741.921.000	5.222.379.000	(47.519.542.000)
5.2	BELANJA MODAL	1.334.160.528.234	478.966.980.816	(855.193.547.418)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.116.254.350	107.899.749.491	8.783.495.141
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	345.118.284.820	208.636.318.775	(136.481.966.045)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	889.247.739.064	160.345.400.000	(728.902.339.064)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	678.250.000	2.085.512.550	1.407.262.550
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	45.607.416.408	132.219.495.055	86.612.078.647
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	45.607.416.408	132.219.495.055	86.612.078.647
5.4	BELANJA TRANSFER	604.238.993.608	737.900.573.302	133.661.579.694
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	602.238.993.608	692.619.983.449	90.380.989.841
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.000.000.000	45.280.589.853	43.280.589.853
	TOTAL BELANJA	5.486.764.678.209	4.840.131.370.695	(646.633.307.514)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(426.482.322.218)	228.761.625.196	655.243.947.414

Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2021

URAIAN	2018	2019	2020	2021
PEMBIAYAAN	277.894.564.023	205.602.009.250	403.706.217.941	258.865.991.151
Penerimaan Pembiayaan	277.894.564.023	216.350.973.250	430.706.217.941	503.023.089.715
Pengeluaran Pembiayaan	-	10.748.964.000	27.000.000.000	244.157.098.564
Pembiayaan Netto	277.894.564.023	205.602.009.250	403.706.217.941	258.865.991.151
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(61.110.892.757)	282.629.763.942	68.383.358.384	62.544.957.627

**Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Pembiayaan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2022-2024**

KODE	URAIAN	2022	Proyeksi 2023	Prakiraan Maju 2024
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	892.226.807.790	4.159.731.999	4.159.731.999
6.1.1.	Penggunaan SiLPA	135.237.297.415	-	-
6.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	752.829.778.376	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	4.159.731.999	4.159.731.999
6.1.6.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-		
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	360.507.188.157	225.475.854.333	398.475.854.333
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472	27.000.000.000	
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	41.020.555.352	41.020.555.352	41.020.555.352
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	198.475.854.333	198.475.854.333	198.475.854.333
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah			
6.2.5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya			
6.Z.	PEMBIAYAAN NETTO	531.719.619.633	(221.316.122.334)	(394.316.122.334)
6.Z.Z.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-	-

STRUKTUR PEMBIAYAAN RANCANGAN APBD TA. 2023

NO	OPD	APBD MURNI 2022	RANCANGAN APBD 2023	+/-
6	PEMBIAYAAN	426.482.322.218	(228.761.625.196)	(655.243.947.414)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	786.989.510.375	4.159.731.999	(782.829.778.376)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	-	(30.000.000.000)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	752.829.778.376	-	(752.829.778.376)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	4.159.731.999	-
	TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN	786.989.510.375	4.159.731.999	(782.829.778.376)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	360.507.188.157	232.921.357.195	(127.585.830.962)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472	218.989.221.528	97.978.443.056
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	41.020.555.352	-	(41.020.555.352)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	198.475.854.333	13.932.135.667	(184.543.718.666)
	TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN	360.507.188.157	232.921.357.195	(127.585.830.962)
	PEMBIAYAAN NETTO	426.482.322.218	(228.761.625.196)	(655.243.947.414)
	SiLPA/(SiKPA)	-	-	-



SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Tema dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023

Tema RKP Tahun 2023

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan



ARAH KEBIJAKAN PROVINSI NTT

2019

TRANSFORMASI STRUKTUR DAN KULTUR DALAM PEMBANGUNAN

- Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pelayanan Dasar
- Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintahan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
- Sinergitas tujuan dan prioritas pembangunan dengan Kabupaten/Kota serta pembaku kepentingan lainnya.
- Reformasi birokrasi system pemerintahan.
- Pengembangan system pemerintahan berbasis elektronik.
- Keterbukaan Informasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

2020

PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA SUMBER DAYA MANUSIA

- Pembangunan Ekonomi Pariwisata sebagai Penggerak Utama Pembangunan.
- Pencapaian dan pemenuhan Stnadar Pelayanan Minimal dan Tujuan pembangunan berkaelanjutan.
- Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan keluarga.
- Pengembangan potensi garam sebagai industry nasional.
- Pengembangan bdan usah Daerah pada sektor-sector potensial dalam penigkatan pendapatan daerah, pembukaan lapangan usha baru dan peningkatan produk local.

2021

PERUBAHAN STRUKTUREKONOMI MENUJU PADA INDUSTRI DAN JASA BEBRASIS PERTANIAN

- Sinergitas tujuan pembangunan berkelanjutan lintas pemangku kepentingan
- Peningkatan Sumber Daya Air untuk kebutuhan pertanian dan air bersih.
- Peningkatan industry pertanian,perikanan dan peternakan.
- Interkoneksi jaringan distribusi produk Daerah dan jaringan pariwisata *Ring of Beauty*.

2022

PENGEMBANGAN MATA RANTAI PARIWISATA

- Kebangkitan pembangunan menuju masyarakat sejahtera
- Kerjasama lintas Daerah dalam pengembangan produk local
- Pengembangan industry pariwisata dengan Provinsi lain dan luar negeri.

2023

KEMANDIRIAN LOKAL

- Kemandirian Masyarakat dalam pengelolaan Ekonomi berkelanjutan.
- Peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Pembangunan industry pariwisata sebagai penggerak multi sektor.

TEMA & PRIORITAS DAERAH

TEMA : PEMULIHAN KESEHATAN DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN LOKAL

PRIORITAS DAERAH

Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat

PRIORITAS DAERAH

Penguatan system kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif

PRIORITAS DAERAH

Transformasi sector pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja

1

2

3

4

5

6

PRIORITAS DAERAH

Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik

PRIORITAS DAERAH

Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi

PRIORITAS DAERAH

Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana

TARGET PENCAPAIAN KINERJA MAKRO DAERAH TAHUN 2023

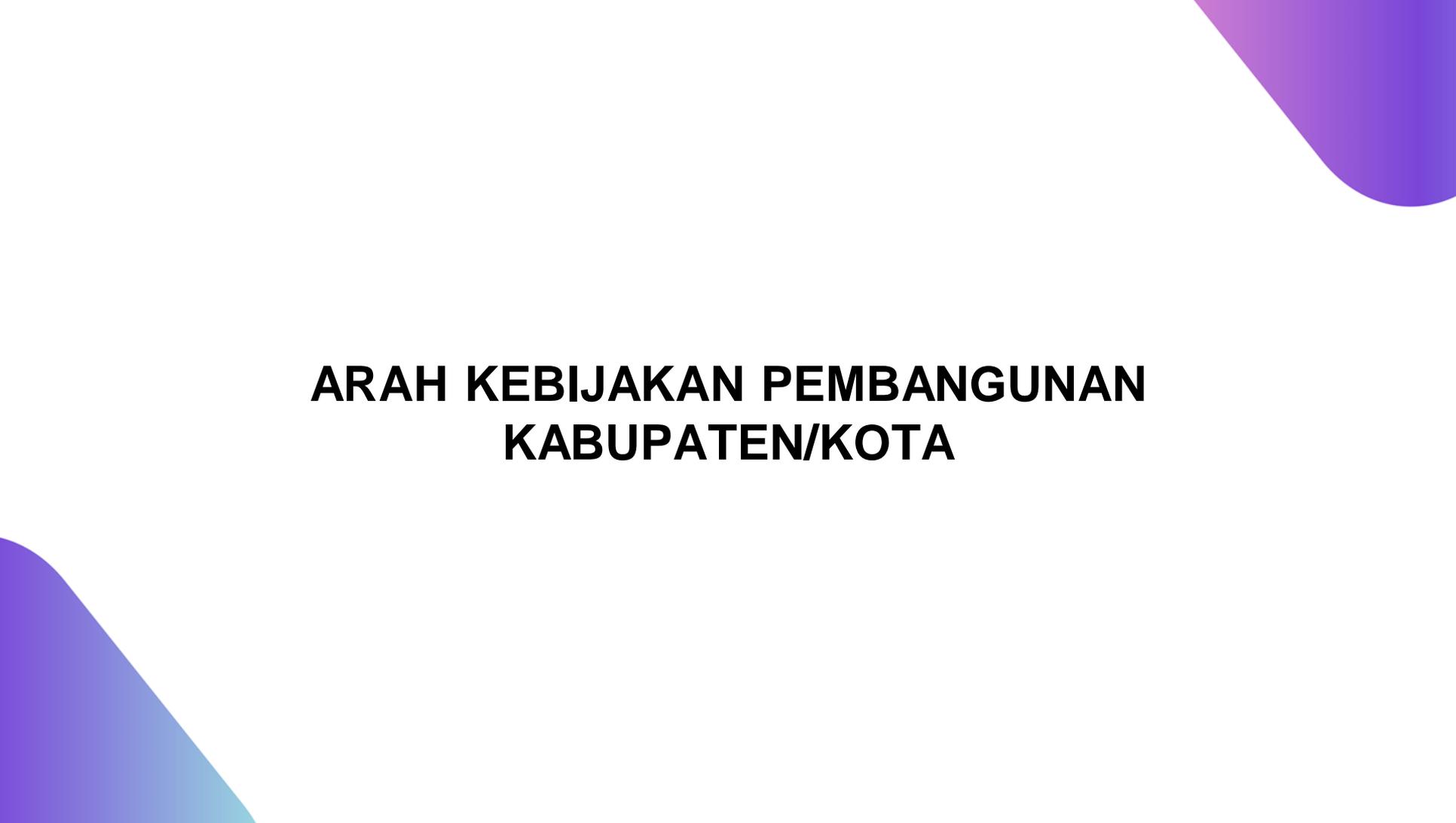
Indikator	Satuan	Rencana Jangka Menengah		Rencana Tahunan		Target Tahun 2024
		RPJMN 2020-2024 untuk Tahun 2022	RPJMD-P 2018-2023 untuk Tahun 2022	RKP 2023	RKPD 2023	
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,9	6,33 - 6,90	5.4-5.9	3.47-4.97	5,7 – 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	16,15	19,35 - 16,15	15.56-16.50	19.75-16.66	6,0 – 7,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	2,6	2,5 - 1,9	2.92-3.30	3.03	3,6 – 4,3
Kebutuhan Investasi	(Rp. Triliun)	71,47	71,47	-	80.94	-
Gini Rasio	Indeks	0,376 – 0,378	0,34 – 0,33	-	0.345	0,360 – 0,374
IPM	Nilai	73,44 – 73,48	67,35 – 69,00	-	65.73	75,54
Penurunan Emisi GRK (tCO₂^{eq})	Persen	26,8 – 27,1	17.248.829	-	17.248.829	27,3

Target Pencapaian Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2023

Indikator	RKP 2023		Target PROVINSI NTT	
	WILAYAH NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA TIMUR	RPJMD-P TAHUN 2023	RKPD TAHUN 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1-5,7	5,4-5,9	6,7 - 7,3	3,4- 4,97
Tingkat Kemiskinan	14,8-13,8	16,50-15,56	15 - 12	19,75- 16,66
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,1-2,7	3,3-3,92	1,9 - 1,5	3,03
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	66,63-69,58	66,63-69,66	70 - 71	65,73
Rasio Gini (poin)	0,355-0,379	0,336-0,335	0,34 - 0,32	0,345
Inflasi (%)			3 - 3,2	3 - 3,2
Prevalensi Stunting (%)			12-10	12-10
PDRB Perkapita			25-27	25-27
Rasio Gini (poin)			0,34 - 0,32	0,32
Indeks Pembangunan Gender (poin)			95	95
Rasio PAD (%)			39,74	39,74
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq)			17.248.829	17.248.829
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)			80,94	80,94
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Poin)			71	71 ₉₉

Fokus kegiatan dan Usulan 2023 di kelompokkan menjadi :

- 1.Konektivitas Wilayah
- 2.Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan
- 3.Pengembangan Industri dan Rantai Nilai, termasuk Rantai Nilai Pariwisata
- 4.Peningkatan Kualitas hidup Manusia, termasuk didalamnya peningkatan prestasi olahraga



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Prediksi dan Target Nilai Riil PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT Tahun 2022-2023

Wilayah	Nilai Riil PDRB (Rp.Milyar)		Laju Pertumbuhan	
	Prediksi 2022	2023	Prediksi 2022	2023
Sumba Barat	1.540,06	1.582,40	6,93%	3,27%
Sumba Timur	4.259,99	4.389,50	6,63%	3,32%
Sumba Tengah	804,03	825,01	7,08%	3,19%
Sumba Barat Daya	2.464,49	2.528,78	7,08%	3,21%
Lembata	1.246,21	1.280,76	6,90%	3,27%
Flores Timur	3.759,23	3.838,63	7,60%	3,12%
Sikka	3.525,51	3.641,52	6,31%	3,21%
Nagekeo	1.471,52	1.506,11	7,34%	3,09%
Ende	4.367,97	4.511,13	6,38%	3,29%
Ngada	2.477,07	2.543,39	7,00%	3,29%
Manggarai Timur	2.191,87	2.241,57	7.43%	3.37%
Manggarai Barat	2.396,85	2.466,64	6,76%	3,21%
Manggarai	3.211,08	3.308,24	6.64%	3.32%
Alor	2.137,15	2.201,70	6.65%	3.20%
Sabu Raijua	841,32	865,13	6,84%	3,33%
Rote Ndao	2.063,39	2.126,34	6.62%	3.37%
Belu	3.205,28	3.291,01	7.01%	3.63%
Malaka	2.013,94	2.058,59	7,49%	3,35%
Timor Tengah Utara	3.084,94	3.177,19	6,68%	3,18%
Timor Tengah Selatan	5.070,76	5.220,41	6,72%	3,15%
Kupang	5.139,35	5.292,59	6,69%	3,29%
Kota Kupang	17.867,16	18.600,43	5,54%	4,11%
Nusa Tenggara Timur	75.137,14	77.497,06	6,52%	3,47%

Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2022-2023

Wilayah	2022 (%)	2023(%)
Sumba Barat	27.22	26.84
Sumba Timur	27.14	26.61
Sumba Tengah	34.66	34.74
Sumba Barat Daya	27.67	27.54
Lembata	23.88	23.60
Flores Timur	8.30	7.98
Sikka	12.45	12.13
Nagekeo	12.73	12.71
Ende	24.36	24.57
Ngada	12.29	12.19
Manggarai Timur	27.41	27.60
Manggarai Barat	16.71	16.26
Manggarai	20.50	20.34
Alor	20.31	19.95
Sabu Raijua	28.71	28.72
Rote Ndao	29.18	27.94
Belu	14.84	14.93
Malaka	15.33	15.03
Timor Tengah Utara	24.42	21.03
Timor Tengah Selatan	25.44	21.81
Kupang	19.54	18.27
Kota Kupang	9.36	9.32
Nusa Tenggara Timur	20.09	19.75

Arahan Penurunan TPT bagi Kab/Kota se-NTTTahun Rencana 2023

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023		
						Forecast	Lower CB	Upper CB	Forecast	Lower CB	Upper CB
Sumba Barat	3,83	4,06	3,15	3,96	1,74	2,97	2,16	3,78	1,82	1,01	2,64
Sumba Timur	2,90	1,42	2,13	3,49	3,35	2,91	0,93	4,89	2,82	0,61	5,03
Kupang	3,52	2,71	4,48	4,90	3,99	4,54	2,43	6,66	3,47	0,82	6,12
Timor Tengah Selatan	1,70	1,01	1,94	2,63	2,57	2,60	1,00	4,20	2,63	0,47	4,79
Timor Tengah Utara	0,60	0,85	1,22	4,26	3,88	3,20	0,68	5,73	3,17	0,34	5,99
Belu	2,47	5,26	7,19	7,42	5,35	6,64	4,30	8,97	8,49	6,15	10,83
Alor	1,86	4,09	3,03	3,11	2,59	3,57	1,85	5,30	3,50	1,72	5,28
Lembata	4,18	5,40	4,31	4,88	4,94	5,31	3,09	7,54	5,46	3,22	7,70
Flores Timur	5,45	4,01	3,09	3,16	3,81	2,75	0,29	5,20	2,60	0,07	5,13
Sikka	2,50	2,43	3,56	4,00	4,54	3,62	1,23	6,01	3,64	1,25	6,03
Ende	3,66	2,89	2,98	2,95	2,61	2,75	1,63	3,88	2,80	1,67	3,93
Ngada	3,23	2,11	3,38	4,69	2,99	4,75	2,31	7,19	6,16	3,70	8,62
Manggarai	4,09	3,21	3,11	4,09	3,70	4,39	2,48	6,29	4,56	2,64	6,48
Rote Ndao	2,52	2,11	2,73	4,90	3,67	3,00	0,34	5,66	2,88	0,14	5,62
Manggarai Barat	1,30	1,19	2,42	3,72	4,94	3,35	1,31	5,39	3,43	1,32	5,53
Sumba Tengah	4,26	3,57	3,43	4,02	1,45	2,80	1,20	4,39	2,27	0,67	3,86
Sumba Barat Daya	1,61	1,01	1,25	2,36	2,04	1,59	0,13	3,06	1,52	0,04	2,99
Nagekeo	3,60	1,88	2,76	3,09	0,97	2,51	1,28	3,74	2,94	1,67	4,21
Manggarai Timur	0,50	1,57	0,95	2,10	1,96	2,93	2,63	3,23	2,44	2,14	2,74
Sabu Raijua	2,75	2,12	2,89	3,08	1,25	1,51	0,28	2,74	1,27	0,04	2,50
Malaka	1,07	3,79	2,34	3,63	3,43	3,39	0,88	5,90	3,44	0,63	6,24
Kota Kupang	12,50	10,17	9,78	10,90	9,76	9,71	4,44	14,97	9,65	2,21	17,09
Nusa Tenggara Timur	3,27	3,01	3,35	4,28	3,77	3,10	1,86	4,33	3,03	1,79	4,28

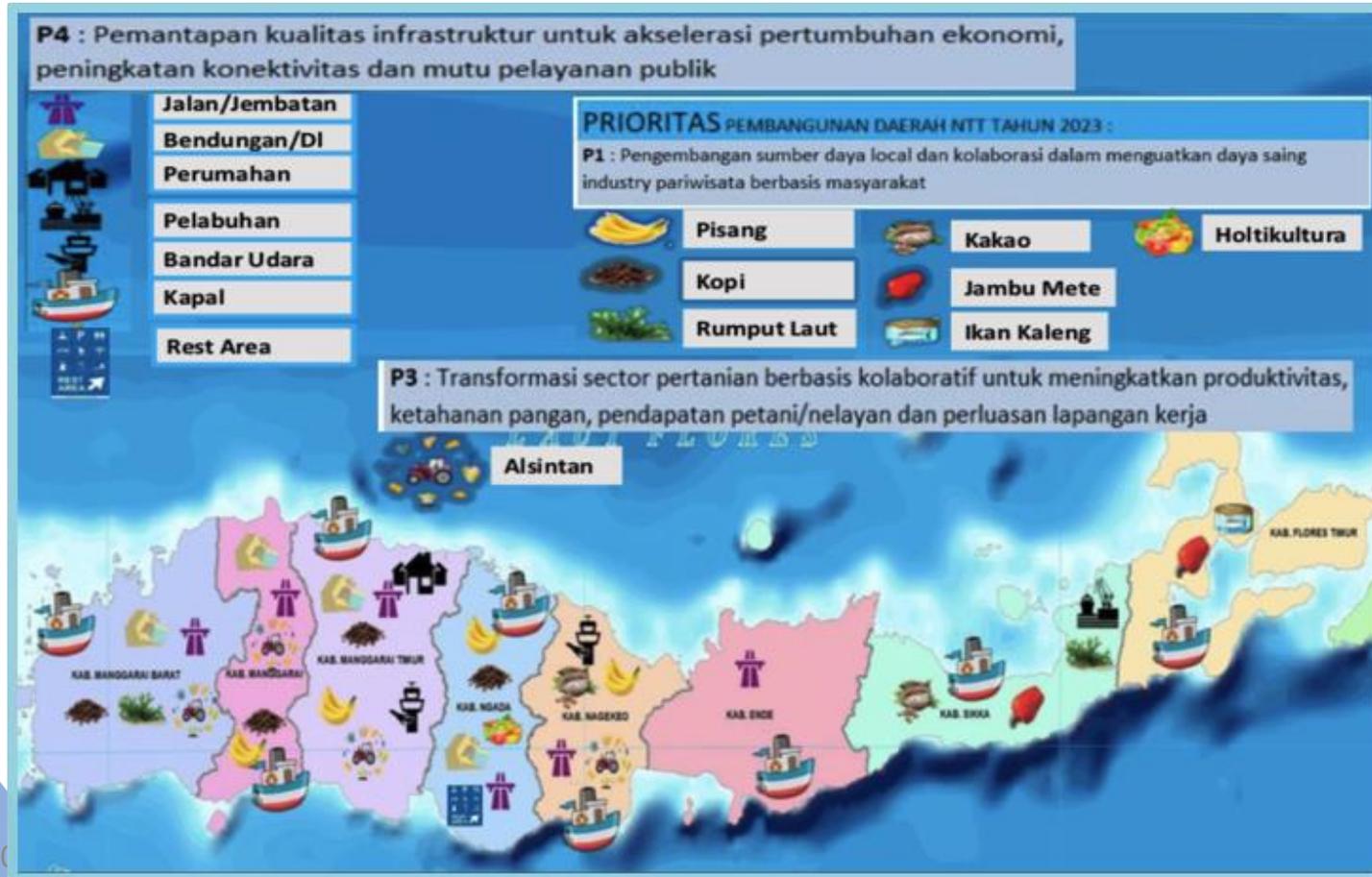
Target Capaian Indeks
Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota
Se-Nusa Tenggara Timur Tahun
2021 dan 2022

Wilayah	Target	
	2022	2023
Sumba Barat	64,09	64,35
Sumba Timur	66,69	67,26
Kupang	64,98	65,51
Timor Tengah Selatan	62,48	62,50
Timor Tengah Utara	63,88	64,00
Belu	62,92	63,00
Alor	62,36	62,93
Lembata	65,03	65,10
Flores Timur	65,73	66,42
Sikka	66,24	66,84
Ende	67,52	67,75
Ngada	68,61	69,17
Manggarai	66,10	66,80
Rote Ndao	63,74	64,50
Manggarai Barat	64,90	65,58
Sumba Tengah	62,27	62,74
Sumba Barat Daya	62,85	63,40
Nagekeo	67,02	67,57
Manggarai Timur	61,96	62,55
Sabu Raijua	57,59	58,10
Malaka	60,67	60,91
Kota Kupang	80,21	80,64
Nusa Tenggara Timur	65,6	65,73



INTERVENSI RKPD PROVINSI NTT TAHUN 2023

Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Flores



Fokus dan Lokasi Usulan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 di Kabupaten – Kabupaten wilayah Sumba, Sabu Raijua dan Rote Ndao

KAB. ROTE NDAO

P4 : Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik

- Jalan/Jembatan
- Bendungan/DI
- Kapal
- Sekolah
- Pabrik Rumput Laut

KAB. SABU RAIJUA

P2 : Penguatan system kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif

PLTS

P3 : Transformasi sector pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja

Alsintan

KAB. SUMBA BARAT DAYA, **KAB. SUMBA BARAT**, **KAB. SUMBA TENGAH**, **KAB. SUMBA TIMUR**

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH NTT TAHUN 2023 :

P1 : Pengembangan sumber daya local dan kolaborasi dalam menguatkan daya saing industry pariwisata berbasis masyarakat

- Jambu Mete
- Rumput Laut



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI NTT 2021-2023

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan					
Pertumbuhan PDRB (%)	5,20	5,87	6,33	6,7 – 7,3	6,7 – 7,3
Inflasi (%)	0,67	3-3,4	3-3,2	3 – 3,2	3 – 3,2
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21 - 19,63	19,35 – 16,15	15 - 12	15 – 12
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	19,5	20 - 23	23 - 25	25 - 27	25 – 27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,35	3,2 -2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5	1,9 – 1,5
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	23,90	25,31	30,12	39,74	39,74
Indeks Gini (Poin)	0,355	0,35 - 0,34	0,34-0,33	0,34-0,32	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	94	95	95	95

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI NTT 2021-2023

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring of Beauty</i>)					
Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	2	4	6	8	8
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	4	4	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.065.378	1.278.453	1.534.144	1.534.144

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan					
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	85	90	100	100	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	0,390	9,08	45,60	74,81	74,81
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	70	75.02	76.74	78.46	78.46
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	13.974,00	15.498	9.238	9.238	47.948
Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	75	80	85	85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,5	67	69	75	75
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	41,7	72,73	85,70	100	100
Indeks Resiko Bencana (Poin)	147	140	138	135	135

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia					
Angka Melek Huruf (%)	95,76	96,56	98,47	100	100
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,55	8,25	8,65	9,5	9,5
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	14,2	14,6	15	15
Usia Harapan Hidup (Tahun)	66,85	68,1	68,8	69	69
Prevelensi Stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10 - 12	10 - 12
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	40	60	70	80	80

Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	60,37	65	69	71	71
Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	B	A	A	A	A
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	44,41	50	60	75	75
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	75	85	90	90	90
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,32	82,40	82,50	83	83

PERSANDINGAN RPJMD-P TAHUN 2018-2023 DAN RANCANGAN RKPD TAHUN 2023 PEMERINTAH PROVINSI NTT

- ❑ ADA 193 PROGRAM YANG DALAM RPJMD-P 2018-2023 DAN RKPD 2023
- ❑ DARI ASPEK PENGANGGARAN TERDAPAT BEBERAPA PROGRAM TIDAK ADA PENDANAANNYA DAN DISKENARIOKAN UNTUK DI KOLABORASIKAN DENGAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA

**Persandingan P-RPJMD Tahun 2018-2023 dan Rancangan RKPD Tahun 2023
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
		NON URUSAN	2.573.424.163.776	37.775.052.678	-2.535.649.111.098	
	Semua Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.573.424.163.776	37.775.052.678	-2.535.649.111.098	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.261.774.144.699	3.441.161.606.091	179.387.461.392	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.026.963.335.327	1.867.111.570.319	-159.851.765.008	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	978.502.406.139	978.502.406.139	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.024.279.105.537	887.230.885.280	-1.137.048.220.257	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.021.160.000	1.168.776.500	147.616.500	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	850.515.500	0	-850.515.500	
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	812.554.290	209.502.400	-603.051.890	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	268.397.951.105	569.671.712.740	301.273.761.635	
1	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	235.926.790.222	235.926.790.222	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	240.423.900.642,43	56.055.466.800	-184.368.433.842	
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	26.747.521.963	22.007.907.697	-4.739.614.266	
4	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	950.853.500	0	-950.853.500	
5	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	39.800.223.265	39.800.223.265	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
6	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	184.839.955.116	184.839.955.116	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
7	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	31.041.369.640	31.041.369.640	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
8	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN	275.675.000	0	-275.675.000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	880.867.229.016	897.553.437.960	16.686.208.944	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	56.935.497.161	56.935.497.161	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	230.552.413.581	221.038.746.174	-9.513.667.407	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.112.488.220	19.350.000.000	12.237.511.780	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	747.495.000	3.450.000.000	2.702.505.000	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0	4.250.000.000	4.250.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.000.000.000	6.750.000.000	3.750.000.000	
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	119.286.650.153	88.107.574.000	-31.179.076.153	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	964.067.445	3.510.000.164	2.545.932.719	
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	0	0	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	508.561.982.990,97	486.479.057.932	-22.082.925.059	
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.392.588.789	745.274.820	-2.647.313.969	
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	7.249.542.837	6.937.287.709	-312.255.128	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	61.233.833.608	59.485.686.142	-1.748.147.466	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.250.000.000	6.457.208.900	4.207.208.900	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	44.735.271.907	40.307.582.192	-4.427.689.715	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	14.248.561.701	12.720.895.050	-1.527.666.651	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.781.185.606	29.121.956.838	25.340.771.232	
1	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	14.427.204.448	14.427.204.448	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.585.749.356	1.399.298.800	-2.186.450.556	
3	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	195.436.250	48.535.000	-146.901.250	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	7.641.701.800	7.641.701.800	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0	5.605.216.790	5.605.216.790	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.530.610.037	18.217.242.092	-2.313.367.945	
1	Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	0	
2	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.383.851.461	2.980.219.450	-1.403.632.011	
3	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	266.258.974	261.008.900	-5.250.074	
4	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.615.319.471	10.121.567.042	-1.493.752.429	
5	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.558.124.078	4.057.162.900	499.038.822	
6	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	627.890.720	713.283.800	85.393.080	
7	Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	79.165.333	84.000.000	4.834.667	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	179.370.419.880	373.766.606.580	194.396.186.700	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	787.900.592	1.000.000.000	212.099.408	
1	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	341.731.657	0	-341.731.657	
2	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	209.810.028	600.000.000	390.189.972	
3	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	110.955.874	250.000.000	139.044.126	
4	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	125.403.033	150.000.000	24.596.967	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Transmigrasi					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.664.506.896	9.494.026.384	4.829.519.488	
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	7.310.655.725	7.310.655.725	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.921.191.353	307.780.140	-1.613.411.213	
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.072.452.696	782.989.599	-289.463.097	
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	506.010.146	233.592.410	-272.417.736	
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	195.772.674	124.695.060	-71.077.614	
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	871.022.552	431.882.500	-439.140.052	
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	98.057.475	302.430.950	204.373.475	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.899.092.801	1.773.455.840	-2.125.636.961	
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.417.060.566	1.184.937.760	-2.232.122.806	
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	135.674.583,04	206.419.680	70.745.097	
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	346.357.651,95	382.098.400	35.740.748	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	368.863.406	1.442.080.800	1.073.217.394	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	0	111.089.600	111.089.600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0	87.703.600	87.703.600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RPKD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	0	127.311.600	127.311.600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	0	994.489.400	994.489.400	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	0	121.486.600	121.486.600	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	368.863.406	0	-368.863.406	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.942.542.131	105.882.018.088	92.939.475.957	
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	99.186.989.216	99.186.989.216	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.083.129.502	576.452.600	-506.676.902	
3		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	35.000.000	35.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
4					0	
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.141.862.333	1.324.280.692	-817.581.641	
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	7.963.490.227	3.141.513.580	-4.821.976.647	
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	321.657.183	383.374.600	61.717.417	
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	564.693.511	104.666.000	-460.027.511	
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	289.104.046	174.664.300	-114.439.746	
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	578.605.329	955.077.100	376.471.771	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	664.891.980	2.418.201.000	1.753.309.020	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	664.891.980	2.418.201.000	1.753.309.020	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.750.855.080	91.237.713.746	50.486.858.666	
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	10.249.995.500	10.249.995.500	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	0	75.000.000	75.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	0	0	0	
4			0			
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.129.027.040	2.342.500.000	213.472.960	
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	38.621.828.040	78.570.218.246	39.948.390.206	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	29.784.267.514	57.631.551.599	27.847.284.085	
1	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	18.583.008.912	18.583.008.912	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.667.820.456	4.590.588.653	922.768.197	
3	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	24.704.988.168	34.457.954.034	9.752.965.866	
4	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.411.458.890	0	-1.411.458.890	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.569.574.642	12.829.020.352	8.259.445.710	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	9.698.025.792	9.698.025.792	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.177.645.337	1.482.914.700	305.269.363	
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.391.929.305	1.648.079.860	-1.743.849.445	
4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.129.223.847	28.839.818.286	26.710.594.439	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5	Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	25.419.854.286	25.419.854.286	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
6	Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0	2.255.674.000	2.255.674.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
7	Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.129.223.847	1.164.290.000	-964.933.847	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.451.539.522	10.585.555.579	8.134.016.057	
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	9.339.336.088	9.339.336.088	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	477.729.396	175.000.000	-302.729.396	
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	624.211.565	195.000.000	-429.211.565	
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	830.607.516	576.219.491	-254.388.025	
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	358.298.711	150.000.000	-208.298.711	
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	160.692.334	150.000.000	-10.692.334	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	53.679.971.652	32.791.351.426	-20.888.620.226	
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	14.700.000.000	14.700.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.173.355.891	2.800.000.000	-373.355.891	
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	49.420.851.761	14.591.351.426	-34.829.500.335	
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.085.764.000	700.000.000	-385.764.000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	108.482.373	400.000.000	291.517.627	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	108.482.373	400.000.000	291.517.627	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPd	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	302.561.841	500.000.000	197.438.159	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	302.561.841	500.000.000	197.438.159	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	14.883.579.786	14.175.760.680	-707.819.106	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	3.401.792.030	3.401.792.030	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8.156.988.367	1.762.997.750	-6.393.990.617	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.776.160.113	3.352.976.700	576.816.587	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	271.441.000	300.000.000	28.559.000	
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.477.588.097	1.342.994.200	-1.134.593.897	
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.201.402.209	4.015.000.000	2.813.597.791	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.579.857.755	1.893.052.800	-3.686.804.955	
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	0	
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	5.579.857.755	1.823.052.800	-3.756.804.955	
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0	70.000.000	70.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.802.708.062	873.000.000	-929.708.062	
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.476.979.047	770.000.000	-706.979.047	
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	325.729.015	103.000.000	-222.729.015	
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	229.062.613.013	297.893.791.401	68.831.178.388	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	56.782.533.854	55.183.354.884	-1.599.178.970	
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	21.863.831.610	21.863.831.610	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.913.302.843	1.340.000.000	-1.573.302.843	
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	29.859.875.000	28.979.523.274	-880.351.726	
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	18.372.652.563	855.000.000	-17.517.652.563	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.608.203.448	1.705.000.000	-2.903.203.448	
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.028.500.000	440.000.000	-588.500.000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	21.664.865.188	43.919.841.112	22.254.975.924	
1	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	12.847.779.844	12.847.779.844	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.500.000.000	13.515.445.299	4.015.445.299	
3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.998.972.691	10.748.474.569	7.749.501.878	
4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	6.248.182.400	3.843.312.200	-2.404.870.200	
5	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.917.710.097	2.964.829.200	47.119.103	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	62.055.353.181	114.362.921.889	52.307.568.708	
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	43.467.677.384	43.467.677.384	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0	15.681.401.250	15.681.401.250	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.405.624.440	5.000.000.000	-405.624.440	
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.031.360.970	740.616.480	-290.744.490	
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.443.610.156	2.200.000.000	-1.243.610.156	
6	Dinas Peternakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	25.360.056.894	25.360.056.894	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
7	Dinas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	47.302.845.316	19.319.213.440	-27.983.631.876	
8	Dinas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0	233.178.000	233.178.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
9	Dinas Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.871.912.299	2.360.778.441	-2.511.133.858	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	61.506.334.281	21.554.201.933	-39.952.132.348	
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.891.993.376	18.707.175.473	-32.184.817.903	
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	9.108.559.656	926.758.620	-8.181.801.036	
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.379.440.176	1.485.267.840	105.827.664	
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	126.341.073	435.000.000	308.658.927	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.131.074.409	20.742.824.351	15.611.749.942	
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	14.766.566.701	14.766.566.701	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	1.638.364.891	1.443.762.710	-194.602.181	
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	677.616.948	519.854.580	-157.762.368	
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1.534.574.821	1.994.172.460	459.597.639	
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.280.517.749	2.018.467.900	737.950.151	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.815.891.811	14.944.143.640	5.128.251.829	
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	211.435.112	449.357.600	237.922.488	
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	287.082.516	0	-287.082.516	
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.290.320.114	1.078.296.440	-212.023.674	
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	848.202.963	899.195.300	50.992.337	
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.219.860.981	1.683.698.500	-1.536.162.481	
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.958.990.125	10.833.595.800	6.874.605.675	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	11.563.679.388	26.186.503.592	14.622.824.204	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	12.955.614.882	12.955.614.882	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	11.017.608.955	12.831.797.970	1.814.189.015	
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	326.750.513	89.325.740	-237.424.773	
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	219.319.920	309.765.000	90.445.080	
5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	542.880.901	1.000.000.000	457.119.099	
6	Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	62.200.933	225.000.000	162.799.067	
7	Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	289.884.167	300.000.000	10.115.833	
8	Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	190.795.801	475.000.000	284.204.199	
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	247.217.368.972	298.304.014.682	51.086.645.710	
		SEKRETARIAT DAERAH	168.723.220.975	128.042.930.346	-40.680.290.629	
1	Biro Umum	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	143.303.498.014	102.766.146.076	-40.537.351.938	
2	Biro Administrasi Pimpinan	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	0	0	0	
3	Biro Hukum	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	0	
4	Biro Hukum	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.543.199.068	1.336.802.700	-2.206.396.368	
5	Biro Organisasi	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		0	0	
6	Biro Organisasi	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.402.714.747	1.340.199.720	-3.062.515.027	
7	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	0	
8	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.308.594.926	1.076.503.000	-1.232.091.926	
9	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.505.603.684	13.046.546.100	6.540.942.416	
10	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	0	
11	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.855.122.918	925.899.724	-929.223.194	

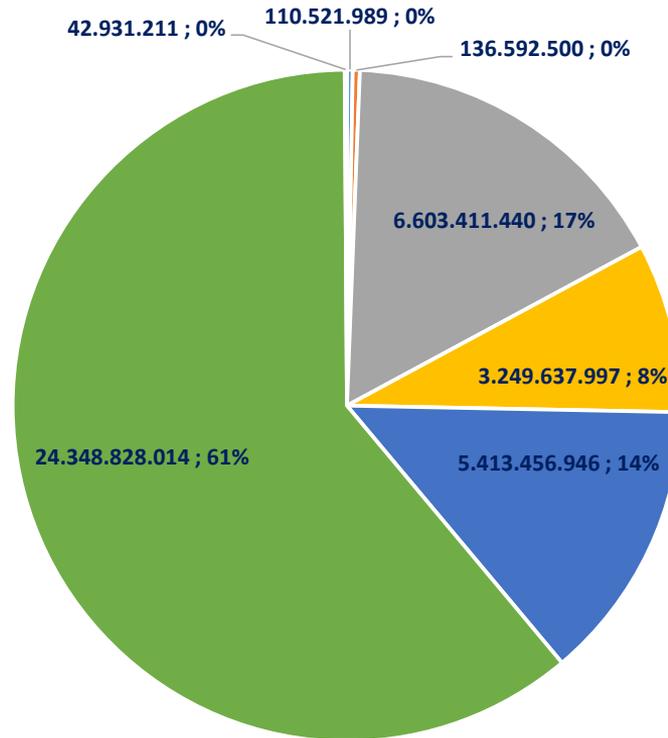
NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
12	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM KEBLIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	32.572.486	600.472.326	567.899.840	
13	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	0	0	
14	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM KEBLIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.771.915.132	6.950.360.700	178.445.568	
		SEKRETARIAT DPRD	78.494.147.997	170.261.084.336	91.766.936.339	
1	Sekretariat DPRD	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	0	92.253.142.126	92.253.142.126	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	78.494.147.997	78.007.942.210	-486.205.787	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	985.173.730.015	1.106.158.179.960	120.984.449.945	
		PERENCANAAN	11.242.677.348	27.750.131.539	16.507.454.191	
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	17.407.332.601	17.407.332.601	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.646.667.551	2.737.238.638	-909.428.913	
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.596.009.797	7.605.560.300	9.550.503	
		KEUANGAN	898.123.311.051	995.861.972.487	97.738.661.436	
1	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	17.883.951.520	17.883.951.520	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	846.128.806.654	857.826.055.981	11.697.249.327	
3	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0	1.200.000.000	1.200.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
4	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	94.155.964.986	94.155.964.986	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
5	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.209.239.129	4.381.000.000	-1.828.239.129	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
6	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	45.785.265.268	20.415.000.000	-25.370.265.268	
		KEPEGAWAIAN	10.581.622.617	14.674.381.084	4.092.758.467	
1	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	11.181.521.384	11.181.521.384	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	10.581.622.617	3.492.859.700	-7.088.762.917	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	51.965.003.999	49.735.470.294	-2.229.533.705	
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	17.079.202.324	17.079.202.324	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	51.965.003.999	32.656.267.970	-19.308.736.029	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.400.306.077	2.116.530.314	-1.283.775.763	
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.400.306.077	2.116.530.314	-1.283.775.763	
		PENGLOAAN PERBATASAN	4.327.778.302	7.322.844.242	2.995.065.940	
1	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	6.517.844.642	6.517.844.642	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	4.327.778.302	804.999.600	-3.522.778.702	
		PENGHUBUNG	5.533.030.621	8.696.850.000	3.163.819.379	
1	Badan Penghubung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	7.955.485.000	7.955.485.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Badan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.533.030.621	741.365.000	-4.791.665.621	
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	18.349.240.381	19.088.366.757	739.126.376	
		INSPEKTORAT DAERAH	18.349.240.381	19.088.366.757	739.126.376	
1	Inspektorat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	12.990.874.556	12.990.874.556	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD	PAGU INDIKATIF RKPD	SELISIH	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	Inspektorat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	14.292.025.608	4.946.003.501	-9.346.022.107	
3	Inspektorat Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.057.214.773	1.151.488.700	-2.905.726.073	
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4.821.997.346	16.939.298.134	12.117.300.788	
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.821.997.346	16.939.298.134	12.117.300.788	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	6.971.976.284	6.971.976.284	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	297.530.421	400.000.000	102.469.579	
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.594.185.004	3.242.430.050	-351.754.954	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	189.889.092	140.234.700	-49.654.392	
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	148.975.767	401.291.700	252.315.933	
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	591.417.062	5.783.365.400	5.191.948.338	
	Total Pagu Urusan		4.925.769.514.306	5.553.311.863.605	627.542.349.299	
	Total Pagu Urusan dan Non Urusan		7.499.193.678.082	5.591.086.916.283	-1.908.106.761.799	

DUKUNGAN PENDANAAN DARI APBN DAN SUMBER LAINNYA

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PROGRAM DI NTT TAHUN 2022



DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN KANTOR DAERAH KANTOR PUSAT APBD APBD KAB/KOTA LEMBAGA MITRA

SUMBER DANA	DANA (dalam Ribuan)	%
DEKONSENTRASI	110.521.989	0,28
TUGAS PEMBANTUAN	136.592.500	0,34
KANTOR DAERAH	6.603.411.440	16,55
KANTOR PUSAT	3.249.637.997	8,14
APBD	5.413.456.946	13,57
APBD KAB/KOTA	24.348.828.014	61,02
LEMBAGA MITRA	42.931.211	0,11
TOTAL	39.905.380.097	

ALOKASI DAK FISIK

NO	BIDANG DAK	ALOKASI TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PENDIDIKAN	132.680.758.000	219.703.448.000	340.584.875.000	256.842.070.000	260.899.607.000
2	KESEHATAN DAN KB	52.498.852.000	25.026.879.000	50.749.002.000	84.327.073.000	73.014.657.256
3	PERTANIAN	-	9.500.000.000	11.018.900.000	8.901.075.000	-
4	JALAN	23.913.382.000	87.193.171.000	140.169.763.000	63.219.292.000	113.539.511.000
5	IRIGASI	4.940.922.000	6.070.559.000	22.453.256.000	29.927.600.000	14.118.029.000
6	PARIWISATA	1.098.810.000	4.961.066.000	2.204.144.000	1.849.999.000	-
7	KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.617.509.000	7.788.708.000	11.466.403.000	14.537.000.000	25.612.303.000
8	TRANSPOTASI PERAIRAN	-	-	-	11.183.980.000	28.629.019.800
9	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	14.798.083.000	15.636.730.000	23.413.000.000	13.770.021.050	16.896.540.120
11	ENERGI SKALA KECIL DAN MENENGAH	35.308.027.000	-	-	-	-
12	SOSIAL	-	-	274.800.000	-	-
TOTAL		270.856.343.000	375.880.561.000	602.334.143.000	484.558.110.050	532.709.667.176

DANA DEKONSENTRASI

NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	BLOKIR
Bappeda Provinsi NTT	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.303.291.000	-
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Program Perpustakaan dan Literasi	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	594.717.000	-
DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Program Keolahragaan	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.302.725.000	-
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	196.148.000	-
		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Data dan Informasi Publik	638.587.000	638.587.000
			Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	194.427.000	194.427.000
		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	39.958.000	-
		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	Layanan Manajemen Kinerja Internal	367.173.000	-
		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Layanan Dukungan Manajemen Internal	278.920.000	278.920.000
		Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Pengelolaan Keuangan Negara	21.450.000	-
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.200.000.000	-
		Pengelolaan Krisis Kesehatan	Pelatihan Bidang Kesehatan	208.235.000	-
		Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Koordinasi	604.473.000	-
		Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	Pelayanan Publik Lainnya	27.858.000	-
	Program Kesehatan Masyarakat	Pembinaan Gizi Masyarakat	Bantuan Masyarakat	13.897.680.000	-
			Pelatihan Bidang Kesehatan	3.643.930.000	-
			Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	85.000.000	-
		Pembinaan Kesehatan Keluarga	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	60.120.000	-
			Koordinasi	762.248.000	-
			Pelatihan Bidang Kesehatan	2.968.562.000	-
			Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	418.002.000	-
		Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	46.300.000	-
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	80.260.000	-

NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	BLOKIR
			*Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	10.140.000	-
		*Penyehatan Lingkungan	*Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	518.045.000	-
		*Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	929.200.000	-
			*Promosi	1.682.900.000	-
	*Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	*Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	*Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	483.438.000	98.154.000
		*Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Koordinasi	149.882.000	-
		*Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	*Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	198.704.000	-
			*Sosialisasi dan Diseminasi	185.564.000	-
		*Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	*Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	90.000.000	-
		*Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	*Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	85.210.000	-
		*Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	*Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	47.542.000	-
		*Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	*Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	156.704.000	-
		*Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	*Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	39.468.000	-
		*Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	*Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	390.570.000	390.570.000
	*Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	*Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	98.932.000	-
			Koordinasi	48.825.000	-
			*Pelatihan Bidang Kesehatan	214.243.000	31.703.000
		*Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	*Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	986.830.000	-
			Koordinasi	125.395.000	-
			*Pelatihan Bidang Kesehatan	4.621.363.000	-
			*Pelayanan Publik kepada masyarakat	187.000.000	-
			*Pelayanan Publik Lainnya	1.615.740.000	6.400.000
		*Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	*Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	19.500.000	-
			*Pelatihan Bidang Kesehatan	918.525.000	-
			*Pelayanan Publik kepada masyarakat	856.869.000	-
		*Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	*Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	182.900.000	-
			Koordinasi	56.898.000	1.350.000
			*Pelatihan Bidang Kesehatan	495.030.000	-
			*Pelayanan Publik Lainnya	2.857.877.000	-

NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	BLOKIR
			'Sosialisasi dan Diseminasi	25.800.000	4.800.000
		'Surveilans dan Karantina Kesehatan	'Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	238.140.000	-
			'Koordinasi	379.712.000	-
			'Pelatihan Bidang Kesehatan	30.974.000	-
			'Pelayanan Publik Lainnya	308.159.000	-
			'Sosialisasi dan Diseminasi	18.450.000	-
	'Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	'Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	'Pelatihan Bidang Kesehatan	3.476.032.000	3.476.032.000
'DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	'Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	'Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	'Kerja sama	251.235.000	251.235.000
			'Pelatihan Bidang Industri	112.500.000	112.500.000
		'Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas	'Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	258.620.000	258.620.000
		'Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	'Pelatihan Bidang Industri	2.114.411.000	2.114.411.000
'DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	'Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi	'Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	'Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	36.129.000	-
			'Perencanaan dan Penganggaran	372.587.000	-
		'Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian	'Data dan Informasi Publik	3.721.683.000	-
		'Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro	'Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	674.626.000	-
		'Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	'Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.517.672.000	-
'DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	'Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	'Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	'Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	13.729.924.000	13.729.924.000
	'Program Dukungan Manajemen	'Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	141.960.000	-
'DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	'Program Penanaman Modal	'Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	'Bantuan Lembaga	291.410.000	-
'DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	'Program Dukungan Manajemen	'Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	29.572.000	-
			'Layanan Manajemen Kinerja Internal	81.580.000	-
		'Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	87.554.000	-
			'Layanan Manajemen Kinerja Internal	66.750.000	-

NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	BLOKIR
		'Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	'Layanan Manajemen Kinerja Internal	50.000.000	-
		'Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	82.800.000	-
			'Layanan Manajemen Kinerja Internal	319.409.000	19.164.000
		'Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	301.900.000	3.900.000
			'Layanan Manajemen Kinerja Internal	112.815.000	22.035.000
		'Pengelolaan Data dan Informasi	'Data dan Informasi Publik	238.620.000	236.100.000
		'Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	'Layanan Manajemen Kinerja Internal	461.380.000	231.880.000
	'Program Kualitas Lingkungan Hidup	'Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	'Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	200.000.000	-
			'Kemitraan	100.000.000	-
			'Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	25.000.000	25.000.000
	'Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	'Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	'Promosi	109.000.000	-
		'Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	'Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	135.050.000	-
	'Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	'Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	'Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	87.900.000	-
		'Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	'Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	77.283.000	-
		'Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	'Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	26.000.000	8.880.000
			'Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	42.990.000	15.890.000
		'Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	'Penyidikan dan Pengujian Penyakit	32.480.000	7.205.000
		'Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	'Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	75.000.000	18.175.000
			'Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	144.000.000	42.800.000
		'Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	'Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	43.736.000	1.100.000
			'Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	223.150.000	16.820.000
		'Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	'Pelayanan Publik kepada lembaga	92.699.000	-
		'Pengelolaan Sumber Daya Ikan	'Pemantauan produk	15.816.000	400.000
		'Perencanaan Ruang Laut	'Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	200.000.000	45.000.000

NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	BLOKIR	
'DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	'Program Dukungan Manajemen	'Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	163.660.000	-	
		'Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	58.440.000	-	
	'Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		'Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	'Fasilitasi dan Pembinaan Industri	827.160.000	-
				'Pelatihan Bidang Industri	78.400.000	-
	'Program Perdagangan Dalam Negeri		'Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	'Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	699.314.000	100.969.000
	'Program Perdagangan Luar Negeri		'Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah	'Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	382.199.000	-
'DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	'Program Dukungan Manajemen	'Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	'Layanan Manajemen Kinerja Internal	898.100.000	-	
			'Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	339.920.000	-
			'Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	'Layanan Manajemen Kinerja Internal	106.260.000	-
			'Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	'Perencanaan dan Penganggaran	1.294.000.000	-
	'Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		'Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	'Koordinasi	60.000.000	-
				'Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	16.821.000	-
			'Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	'Pelayanan Publik kepada masyarakat	5.200.000	-
				'Pelayanan Publik Lainnya	26.000.000	-
			'Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	'Koordinasi	135.000.000	-
			'Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan	'Koordinasi	160.000.000	-
				'Sarana Pengembangan Kawasan	1.609.680.000	-
			'Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	'Koordinasi	100.000.000	-
			'Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	'Pemantauan produk	432.000.000	-
				'Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	831.875.000	-
				'Sertifikasi Produk	648.000.000	-
		'Perbenihan Hortikultura	'Pemantauan produk	100.000.000	-	
			'Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	150.000.000	-	

NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	BLOKIR
			'Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	517.868.000	-
			'Sarana Pengembangan Kawasan	4.804.000.000	-
			'Sertifikasi Produk	286.000.000	-
		'Perlindungan Hortikultura	'Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	45.000.000	-
			'Sarana Pengembangan Kawasan	520.000.000	-
		'Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	'Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	200.000.000	-
			'Koordinasi	100.000.000	-
	'Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	'Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	'Data dan Informasi Publik	56.552.000	-
			'Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	171.000.000	-
		'Penguatan Perlindungan Perkebunan	'Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	230.600.000	-
	'Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	'Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	'Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	300.000.000	-
			'Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	358.200.000	-
			'Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	13.316.334.000	-
			'Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	100.000.000	-
'DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NUSA TENGGARA TIMUR		'Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	'Layanan Manajemen Kinerja Internal	133.800.000	133.800.000
	'Program Pembinaan Ketenagakerjaan	'Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	161.842.000	161.842.000
		'Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	'Pelayanan Publik kepada masyarakat	114.142.000	114.142.000
		'Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (Ditjen PHI dan Jamsos)	'Konferensi dan Event	105.197.000	105.197.000
		'Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja	'Pelatihan Bidang Pendidikan	72.330.000	-
			'Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	49.200.000	-
		'Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Binwasnaker dan K3)	'Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	271.776.000	271.776.000
		'Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI dan Jamsos)	'Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	130.253.000	130.253.000
				110.521.989.000	23.299.961.000

TUGAS PERBANTUAN

LOKASI	NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	BLOKIR
KAB. MALAKA	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka	*Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	*Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	*Bantuan Keluarga	15.000.000	15.000.000
				*Bantuan Peralatan / Sarana	347.724.000	347.724.000
				*Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	148.250.000	148.250.000
				*Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	222.800.000	222.800.000
				*Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	182.530.000	182.530.000
				*Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	1.732.690.000	1.732.690.000
				*Sarana Pengembangan Kawasan	1.050.750.000	1.050.750.000
		*Program Dukungan Manajemen	*Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	*Layanan Dukungan Manajemen Internal	37.963.000	37.963.000
KAB. SUMBA TIMUR	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUMBA TIMUR	*Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	*Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	*Bantuan Keluarga	108.600.000	108.600.000
				*Bantuan Peralatan / Sarana	41.580.000	41.580.000
				*Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	68.410.000	68.410.000
				*Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	310.400.000	310.400.000
				*Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	439.340.000	439.340.000
				*Sarana Pengembangan Kawasan	939.826.000	939.826.000
		*Program Dukungan Manajemen	*Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	*Layanan Dukungan Manajemen Internal	40.143.000	40.143.000
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	*Program Perdagangan Dalam Negeri	*Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	*Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.000.000.000	-

LOKASI	NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	BLOKIR							
'NUSA TENGGARA TIMUR	'DINAS PEKERJAAN UMUM PROP. NUSA TENGGARA TIMUR	'Program Dukungan Manajemen	'Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	783.670.000	-							
			'Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.340.762.000	-							
		'Program Infrastruktur Konektivitas	'Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	'OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	4.289.775.000	-							
				'OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	773.500.000	-							
		'Program Ketahanan Sumber Daya Air	'Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	'OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	28.063.400.000	-							
	'DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	'Program Dukungan Manajemen	'Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	17.700.000	-							
				'Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	'Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	'Bantuan Peralatan / Sarana	2.000.000.000	-					
						'Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	'Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	703.131.000	-				
	'DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	'Program Dukungan Manajemen	'Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	'Layanan Manajemen Kinerja Internal	671.901.000	-							
				'Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	'Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	'Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.864.000.000	-				
						'Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	'Layanan Manajemen Kinerja Internal	'Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	'Perencanaan dan Penganggaran	200.000.000	-		
								'Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	'Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	'Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	'Pelayanan Publik kepada masyarakat	3.658.490.000	-
										'Pelayanan Publik Lainnya	2.847.590.000	-	

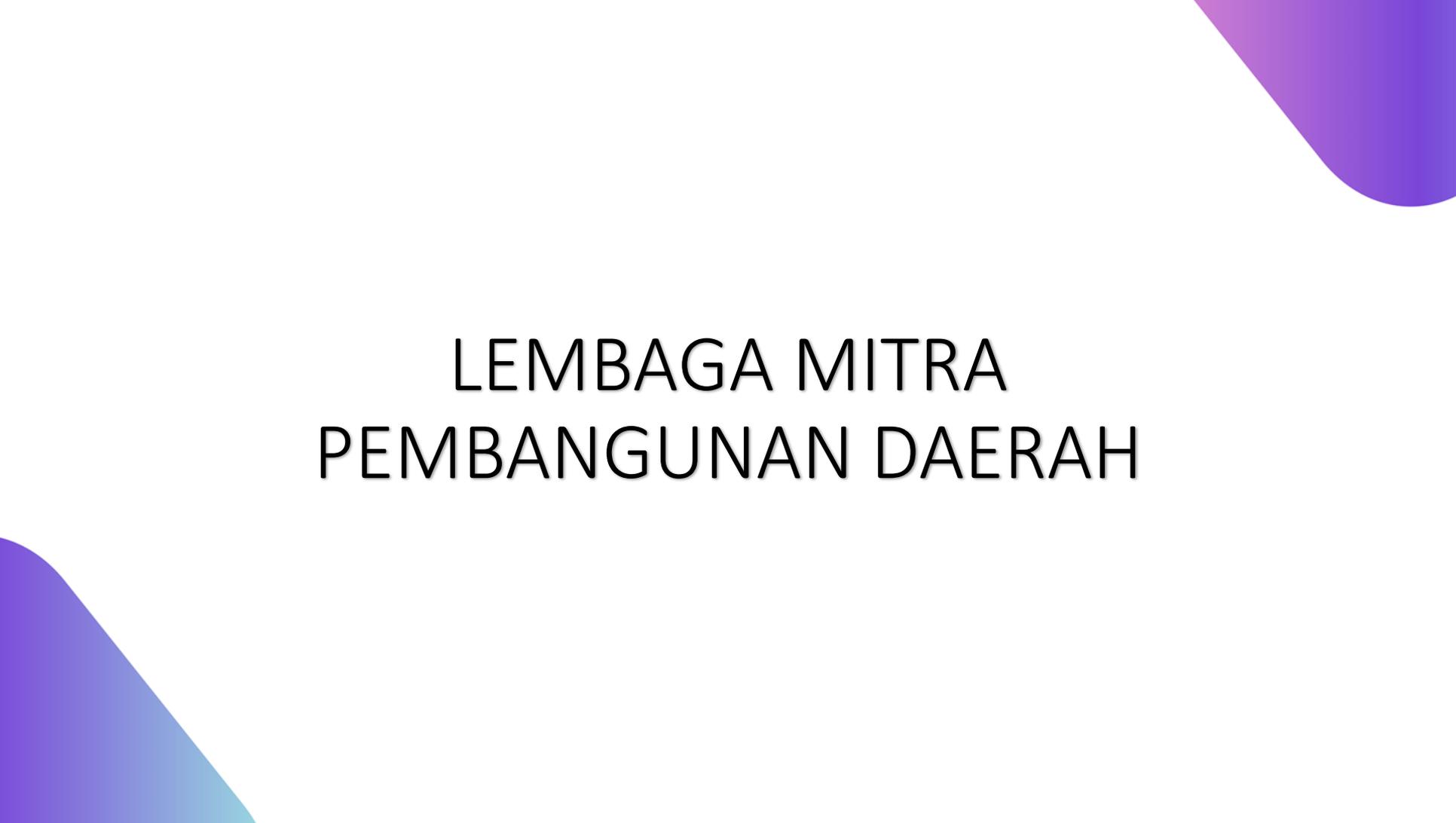
LOKASI	NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	BLOKIR
			'Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	'OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.950.000.000	-
				'Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.186.000.000	-
			'Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal/ Tanaman Pangan	'Koordinasi	560.000.000	-
				'Sarana Pengembangan Kawasan	9.746.000.000	-
			'Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	'Koordinasi	285.000.000	-
			'Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	'Koordinasi	175.000.000	-
				'Sarana Pengembangan Kawasan	6.505.250.000	-
			'Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	'Sarana Pengembangan Kawasan	540.000.000	-
			'Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	'Sarana Pengembangan Kawasan	2.880.000.000	-
			'Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	'Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.500.000.000	-
				'Prasarana Pengembangan Kawasan	11.152.575.000	-
		'Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	'Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	'Koordinasi	87.100.000	-
				'Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	794.200.000	-
				'Promosi	232.000.000	-
				'Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	689.760.000	-
			'Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	'Data dan Informasi Publik	248.200.000	-
				'Koordinasi	720.602.000	-

LOKASI	NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	BLOKIR
				'Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.950.128.000	-
				'Sertifikasi Produk	131.500.000	-
			'Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	'Sarana Pengembangan Kawasan	1.057.500.000	-
			'Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	'Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	970.000.000	-
				'Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	656.312.000	-
			'Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	'Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	175.097.000	55.447.000
				'Sarana Pengembangan Kawasan	325.201.000	-
	'DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	'Program Dukungan Manajemen	'Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	110.092.000	-
				'Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.475.000	-
			'Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	868.250.000	-
		'Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	'Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	'Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.000.000	-
			'Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	'Koordinasi	25.000.000	-
				'Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.528.000.000	-
			'Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	'Pelayanan Publik Lainnya	4.163.640.000	-
			'Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	'Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	25.000.000	-
				'Penyidikan dan Pengujian Produk	151.000.000	-
				'Sertifikasi Lembaga	342.100.000	-

LOKASI	NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	PAGU	BLOKIR
			'Peningkatan Produksi Pakan Ternak	'Bantuan Peralatan / Sarana	600.000.000	-
				'Penyidikan dan Pengujian Produk	66.000.000	-
			'Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	'Bantuan Hewan	9.799.010.000	-
		'Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	'Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	'Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	320.000.000	-
				'Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	100.000.000	-
				'Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	100.000.000	-
	'DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	'Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	'Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	'Bantuan Keluarga	693.390.000	693.390.000
				'Bantuan Peralatan / Sarana	50.560.000	50.560.000
				'Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	298.463.000	298.463.000
				'Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	173.000.000	173.000.000
				'Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	584.140.000	584.140.000
				'Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	2.000.000.000	2.000.000.000
				'Sarana Pengembangan Kawasan	348.950.000	348.950.000
		'Program Dukungan Manajemen	'Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	'Layanan Dukungan Manajemen Internal	37.595.000	37.595.000
					136.592.500.000	9.927.551.000

RINCIAN KEGIATAN PER MISI BERSUMBER APBD DAN APBN TAHUN 2022

Misi	APBD	%	APBN	%	TOTAL	%
Misi 1	150.506.751.000	63,12	584.755.216.141	16,51	735.261.967.141	19,45
Misi 2	18.919.841.112	0,53	0	-	18.919.841.112	0,53
Misi 3	35.251.107.000	14,78	994.595.925.296	28,08	1.029.847.032.296	27,24
Misi 4	51.367.334.000	21,54	640.761.887.224	18,09	692.129.221.224	18,31
Misi 5	1.303.291.000	0,55	1.303.026.022.502	36,79	1.304.329.313.502	34,50
	238.428.483.000		3.542.058.892.275		3.780.487.375.275	



LEMBAGA MITRA PEMBANGUNAN DAERAH

Lembaga Mitra	Program
PPNI	Percepatan Eliminasi Malaria di Provinsi NTT Kerjasama UNICEF-PPNI Provinsi NTT
PPNI	Peningkatan Kualitas dan Cakupan Imunisasi Dasar di Provinsi NTT Kerjasama UNICEF-PPNI Provinsi NTT
INOVASI NTT	Peningkatan hasil belajar siswa jenjang pendidikan dasar di 5 kabupaten mitra di NTT dalam bidang literasi, numerasi dan pendidikan karakter Pancasila dengan prinsip kesetaraan gender, berpihak pada kaum disabilitas dan inklusi sosial.
SAVE THE CHILDREN	SPONSORSHIP
SAVE THE CHILDREN	School For Change
SAVE THE CHILDREN	Better Investment for Stunting Alleviation (BISA)
SAVE THE CHILDREN	Setara Sejak Dini
LSM GARAMIN	Melakukan kajian terkait infratraktur yang ramah untuk semua orang termasuk penyandang disabilitas, Ibu hamil, lansia dan anak-anak dengan memperhatikan prinsip universal design
SURF AID	Penyediaan akses input produksi, peralatan pasca panen, akses air, layanan penunjang
HAKLI	HAKLI NTT dengan Dukungan UNICEF Kantor Perwakilan NTT dan NTB Untuk Penguatan Kapasitas dan Komitmen Pemerintah Untuk Implementasi Program WASH Untuk Pencegahan dan Persebaran Covid-19 Penguatan kapasitas dan Komitmen Pemerintah untuk implementasi program WASH untuk pencegahan persebaran covid-19
YAYASAN PIKUL	Penguatan partisipasi perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
YAYASAN PIKUL	Pengembangan Mini Agroforestri untuk menunjang Ketahanan terhadap Pandemi
Mentari	Program MENTARI (Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia)
Yayasan Humanis dan Inovasi	Yayasan Humanis dan Inovasi
UNDP SSTC	Peacebuilding through Local Economic Development in Indonesia - Timor-Leste Border (UNDP PIID-ISSTC Project)
LSM GARAMIN	Mempersiapkan peneliti - peneliti muda difabel di NTT
LSM GARAMIN	Mendukung difabel mengakses pendidikan dasar dan beasiswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
SURF AID	Peningkatan produksi pangan/pertanian dan nilai tambah produksi dengan penerapan teknologi tepat guna
SURF AID	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi pengurus BUMDes dan aparat desa
SURF AID	Promosi dan Edukasi tentang gizi masyarakat, termasuk air bersih dan sanitasi
WFP	Memperkuat kapasitas TAGANA dan relawan untuk kesiap siagaan bencana
WFP	Bantuan teknis untuk penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi dan Kabupaten
WFP	Penguatan Program Pemerintah khususnya tentang penggunaan beras fortifikasi (Fortifit)
WFP	Fill the Nutrition Gap
UNDP SSTC	Penyediaan Sumber Air Bersih
LSM GARAMIN	Mendukung Percepatan Vaksin Bagi kelompok rentan (Difabel dan Lansia difabel)
YAYASAN PIKUL	Studi Tata Kelola Pemerintahan yang Kuat dan Efektif di Nusa Tenggara Timur

Terima Kasih!

